

**PENGARUH REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh :

Nama : Asmy Asmuri

Nomor Mahasiswa : 01313069

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS EKONOMI**

**ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN**

**YOGYAKARTA**

**2006**

**PENGARUH REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA**

**SKRIPSI**

**disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir  
guna memperoleh gelar Sarjana jenjang strata 1**

**Program Studi Ekonomi Pembangunan,  
pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia**

Oleh :

Nama : Asmy Asmuri  
Nomor Mahasiswa : 01313069  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

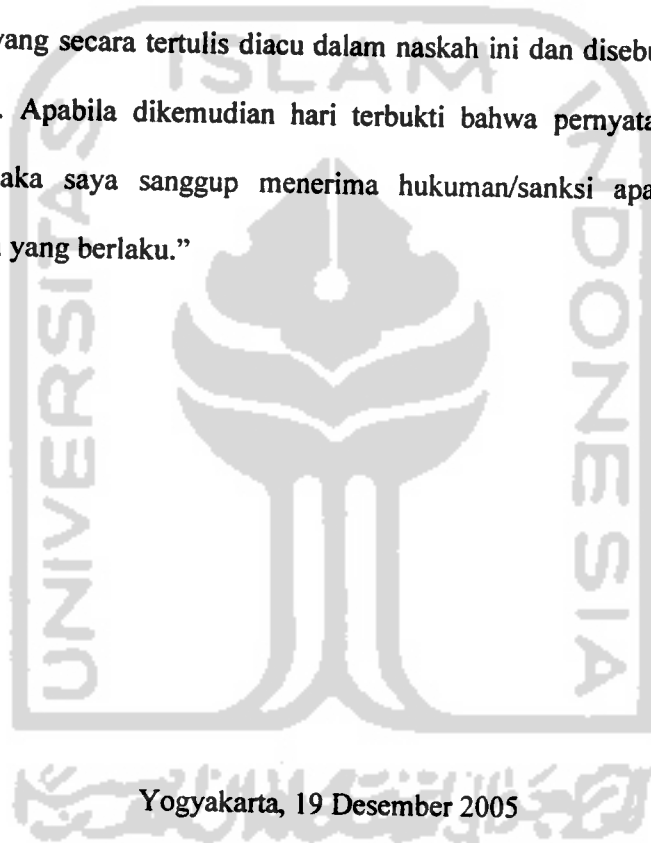
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI**

**YOGYAKARTA**

**2006**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.”



Yogyakarta, 19 Desember 2005

Penulis,

Asmy Asmuri

**HALAMAN PENGESAHAN**

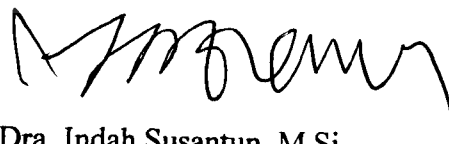
**PENGARUH REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA**

Nama : Asmy Asmuri  
Nomor Mahasiswa : 01313069  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Yogyakarta, Desember 2005

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,



Dra. Indah Susantun, M.Si

**BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI**

**SKRIPSI BERJUDUL**

**PENGARUH REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA**

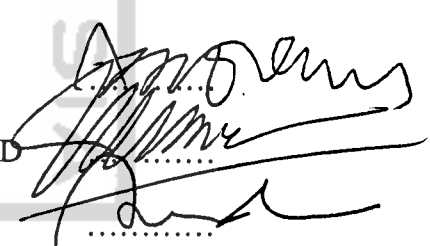
Disusun Oleh: **ASMY ASMURI**  
Nomor mahasiswa: **01313069**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**  
Pada tanggal : 23 Januari 2006

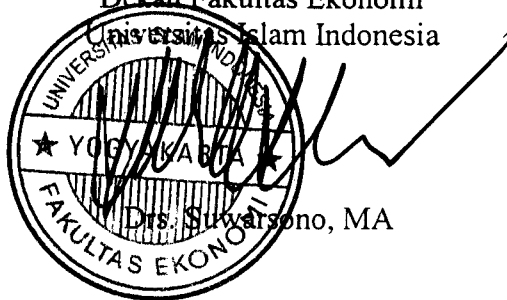
Penguji/Pembimbing Skripsi : Dra. Indah Susantun, M.Si

Penguji I : Drs. Jaka Sriyana, M.Si, P.hD

Penguji II : Drs. Sahabudin Sidiq, MA



Mengetahui  
Dekan Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Indonesia



Drs. Suwardono, MA

## MOTTO

".... Katakanlah hai kaumku, Bekerjalah sebaik-baiknya sesuai dengan tugas dan fungsimu , akupun bekerja, kelak kamu akan mengetahui hasilnya...."

" Bahwa nasib seseorang/suatu kaum itu tidak semata-mata ditentukan oleh Allah SWT, tetapi bagaimana ia mengelolanya "

( Qs.Ar Rakdu 11)

" Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu dan ia merupakan hamba yang di jalan Allah SWT ( Fisabilillah ) sampai ia kembali

( Sabda Rasul )

Pengalaman adalah guru terbaik dalam menjalankan kehidupan dihari yang akan datang

( Penulis )

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*KU PERSEMBAHKAN SKRIPSIKU INI UNTUK :*

- *Allah SWT*
- *Nabi Muhammad SAW*
- *Bapak, Ibu, dan keluarga tercinta yang telah memberikan segalanya buat keberhasilan putranya*
- *Kakakku dan adikku (mas Anton sekeluarga dan Ivo)*
- *Some one in my heart (Fajar Windri Astuti),*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan dan melimpahkan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **PENGARUH REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI PROPINSI DKI JAKARTA.**

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan, di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca dengan tujuan untuk menyempurnakan skripsi ini sangat di harapkan dan diterima dengan senang hati. Dalam menyelesaikan tugas ini, penulis banyak mendapatkan bantuan baik bersifat bimbingan, petunjuk maupun kesempatan berdiskusi. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Suwarsono Muhammad, Drs, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Bapak Agus Widarjono, Drs, Ma, selaku Ketua Program Studi Ilmu Eknomi Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
3. Ibu Indah Susantun, Dra, Msi., sebagai Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, pengarahan, dan saran-saran kepada penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.



4. Kedua orang tua penulis yang dengan ikhlas dan sabar telah banyak memberikan segala sesuatu baik material maupun spiritual dari kecil sampai penulis dapat memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan yang telah banyak memberikan ilmunya di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
6. Mas anton sekeluarga (mbak novi, rozy dan hanif selamat datang di dunia dan adikku astri "IVO").
7. Fajar Windri Astuti dan Keluarga yang selalu memberikan motivasi dan perhatiannya serta cinta dan kasih sayangnya.
8. Keluarga Pakde Sokiman HP sekeluarga dan masyarakat Dusun Karanglo, Sukoharjo terimakasih atas tumpangannya.
9. Keluarga Mbah Pedemo, Mbah karyo Wiyono dan masyarakat dusun ngeplak II.
10. Karyawan/karyawati Kantor BPS dan Dispenda DKI Jakarta.
11. Pak Gunawan yang telah banyak membantu dalam kelancaran administrasi.
12. Teman-teman IESP 2001, Haikal *Ahmed*, "Abang" DEDY, "ahong" GANI, Boyke, Iskak, A'a Eri, Dek Shu, "Bapak" Fatan, Dina, Tita, 7 kurcaci, 3R (rini, risna, rika) dan yang lainnya untuk persahabatan yang berarti.
13. Teman bermain ku semester awal Handaru, Anto, Amin, Hakim, Gusur, Mas ricky, dan lainnya.
14. Teman-teman KKN UII angkatan 28 ( Ramang, Kukuh, Salman, Agus, Nomie, Nita, Dewi, Inan, Mbak Lina) terima kasih atas kerjasamanya.

## DAFTAR ISI

Halaman	
Halaman Judul .....	i
Halaman bebas plagiarisme .....	ii
Halaman Pengesahan skripsi .....	iii
Halaman Pengesahan ujian.....	iv
Halaman Motto .....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Halaman Daftar Isi .....	x
Halaman Daftar Tabel .....	xv
Halaman Daftar Gambar .....	xvi
Abstraksi.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan penelitian .....	8
1.4. Kegunaan penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM SUBYEK PENELITIAN.....</b>	<b>11</b>

2.1. Sejarah Umum Mengenai DKI Jakarta .....	11
2.2. Keadaan Geografis DKI Jakarta .....	13
2.3. Kependudukan .....	15
2.4. Keadaan PAD dan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta .....	16
<b>BAB III KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB IV LANDASAN TEORI DAN HIPOTESA .....</b>	<b>25</b>
4.1. Sumber Keuangan Daerah.....	25
4.2. Pengertian Pajak Daerah .....	27
4.2.1. Definisi Pajak Daerah.....	27
4.2.2. Jenis-jenis Pajak.....	28
4.2.3. Surat Ketetapan Pajak Daerah.....	31
4.3. Deskripsi mengenai variabel independen.....	34
4.3.1. Tingkat Pertumbuhan ekonomi.....	34
4.3.2. Jumlah Wajib Pajak .....	36
4.3.2.1. Pungutan Pajak .....	36
4.3.2.2. Asas Pemungutan Pajak.....	37
4.3.2.3. Teori Pungutan Pajak.....	38
4.3.3. Tingkat Inflasi .....	39
4.3.3.1. Definisi Inflasi .....	39
4.3.3.2. Penggolongan Inflasi .....	40
4.3.3.3. Dampak Inflasi Terhadap Perekonomian.....	41

4.3.3.4. Dampak Inflasi Terhadap individu dan masyarakat ...	42
4.3.4. Reformasi perpajakan.....	43
4.4. Tinjauan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen.....	44
4.4.1. Tingkat Pertumbuhan ekonomi.....	44
4.4.2. Tingkat Inflasi.....	45
4.4.3. Jumlah Wajib Pajak.....	46
4.4.3. Dummy reformasi perpajakan.....	47
4.5. Hipotesa Penelitian.....	48
<b>BAB V</b> <b>METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	49
5.1. Data yang diperlukan.....	49
5.2. Ruang Lingkup Penelitian.....	49
5.3. Definisi Variabel Orasional.....	49
5.4. Metode Analisis Data.....	51
5.4.1. Analisis Deskriptif.....	51
5.4.2. Analisis Kuantitatif.....	51
5.4.2.1. Pengujian Statistik.....	53
5.4.2.2. Pengujian Asumsi Klasik.....	57
5.4.2.2.1. Pengujian Autokorelasi.....	57
5.4.2.2.2. Pengujian Heteroskedastisitas.....	59
5.4.2.2.3. Pengujian Multikolinieritas.....	60

<b>BAB VI ANALISA DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
6.1. Analisis deskriptif .....	62
6.2. Analisis kuantitatif .....	63
6.2.1. Penentuan Bentuk Fungsi Model Empiris dengan MWD ...	64
6.2.2. Hasil analisis regresi awal .....	65
6.2.3. Uji Asumsi Klasik terhadap Regresi Awal .....	66
6.2.3.1 Uji aotokorelasi .....	66
6.3. Hasil regresi perbaikan.....	68
6.4. Hasil uji asumsi klasik terhadap regresi perbaikan.....	69
6.4.1. Uji autokorelasi .....	69
6.4.2. Uji heterokedastisitas .....	70
6.4.3. Uji multikolinearitas.....	71
6.5. Uji F statistik .....	73
6.6. Koefisien determinasi .....	74
6.7. Pengujian secara parsial(uji t) terhadap Penerimaan pajak daerah	75
6.7.1. Pengujian terhadap $\beta_1$ (pertumbuhan ekonomi daerah) .....	75
6.7.2. Pengujian terhadap $\beta_2$ (tingkat inflasi).....	76
6.7.3. Pengujian terhadap $\beta_3$ (jumlah wajib pajak) .....	78
6.7.3. Pengujian terhadap $\beta_4$ (Dummy reformasi perpajakan).....	79
6.8. Interpretasi masing-masing variabel independent .....	80

6.9. Pembahasan .....	81
<b>BAB VII SIMPULAN DAN IMPLIKASI .....</b>	<b>83</b>
7.1. Kesimpulan.....	83
7.2. Implikasi/saran .....	85

Daftar Pustaka

Lampiran

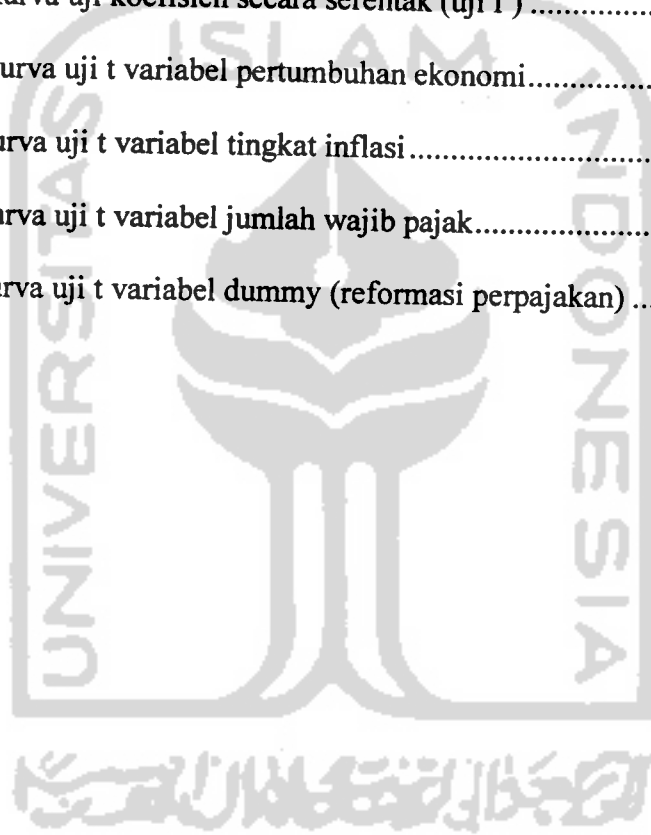


## DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
Tabel 1.1. PDRB atas harga konstan 1993 menurut lapangan usaha 1993-2003 ..	5
Tabel 1.2.. Laju PDRB atas harga konstan menurut lapangan usaha 1993-2003...	6
Tabel 2.1. Luas wilayah Propinsi DKI Jakarta dirinci menurut kotamadya 2003.	14
Tabel 2.2. Jumlah dan kepadatan penduduk DKI Jakarta tahun 2003 .....	16
Tabel 2.3. Penerimaan PAD dan Pajak Daerah tahun 2000-2003 .....	18
Tabel 4.1. Tarif pajak propinsi dan pajak kabupaten .....	31
Tabel 6.1. Data variable penelitian .....	62
Tabel 6.2. Hasil analisis deskriptif.....	63
Tabel 6.3. Ringkasan hasil regresi awal .....	66
Tabel 6.4. Hasil regresi perbaikan .....	68
Tabel 6.5. Hasil uji heteroskedastisitas regresi awal.....	71
Tabel 6.6. Ringkasan hasil uji multtikolinieritas .....	72
Tabel 6.7. Hasil uji f(uji koefisien regresi secara serentak.....	73

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
Gambar 6.1. Kurva uji Autokorelasi.....	67
Gambar 6.2. Kurva uji Autokorelasi.....	70
Gambar 6.3. Kurva uji koefisien secara serentak (uji f) .....	74
Gambar 6.4. Kurva uji t variabel pertumbuhan ekonomi.....	76
Gambar 6.5. Kurva uji t variabel tingkat inflasi .....	77
Gambar 6.6. Kurva uji t variabel jumlah wajib pajak.....	78
Gambar 6.7. Kurva uji t variabel dummy (reformasi perpajakan) .....	79





## ABSTRAKSI

Salah satu sumber pembiayaan yang utama bagi pelaksanaan pembangunan, khususnya di daerah ialah penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Komponen utama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah Pajak, Retribusi, Hasil laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Penerimaan-penerimaan lain yang sah dan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta yang terbesar diperoleh dari Penerimaan Pajak daerah.

Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis Regresi. Analisis ini dimaksudkan untuk mengungkapkan antara variabel dependent dengan variabel independent, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mengarah pada tujuan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari BPS, DISPENDA DKI Jakarta dan sumber-sumber yang lainnya

Selama periode analisis, bahwa secara bersama-sama pertumbuhan ekonomi, Tingkat inflasi, Jumlah wajib pajak, Dummy reformasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah DKI Jakarta. Pengujian secara sendiri-sendiri (per variabel), Pertumbuhan ekonomi dan Jumlah Wajib Pajak berpengaruh Positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah DKI Jakarta, untuk Tingkat Inflasi, tidak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak daerah DKI Jakarta. Untuk variable reformasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah DKI Jakarta.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Runtuhnya ekonomi Indonesia sekarang ini yang gejalanya sudah terlihat sejak terpuruknya nilai rupiah sebelum krisis moneter pertengahan tahun 1997 adalah akibat sentralisme kekuasaan termasuk kekuasaan dalam membuat keputusan ekonomi. Dengan berbagai keputusan ekonomi yang terpusat melalui bermacam-macam Inpres, Keppres dan peraturan pemerintah itu disedotlah berbagai macam hasil kekayaan alam dan pendapatan asli dari daerah ke pusat sehingga menimbulkan ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat. Hal tersebut terjadi di bawah kekuasaan rezim orde baru yang di pimpin oleh Suharto, sifat-sifat penyelenggaraan Negara tersebut mirip atau semodel dengan Negara komunis yang tergabung dalam blok timur.

Dengan jatuhnya Soeharto pada pertengahan tahun 1998 dimulailah babak baru untuk menata kembali Indonesia dengan masa depan yang lebih baik. Di masa mendatang pasca Soeharto sentralisme tidak boleh lagi ada baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Setelah runtuhnya soeharto yang di gantikan oleh presiden Habibie, setelah menjabat kurang dari satu tahun presiden habibie mulai membuat perombakan di segala bidang seperti halnya

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan pusat dan daerah.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah yang sudah diberlakukan mulai bulan Januari tahun 2001 yang lalu menyatakan bahwa pemerintah daerah hanya terdiri dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota tidak ada lagi daerah kotamadya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini tidak dikenal lagi pembagian daerah sebagai daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Dengan telah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 tersebut maka daerah-daerah yang ada di Indonesia harus membiayai pembangunan daerahnya masing-masing tanpa mengandalkan subsidi dari pemerintah pusat lagi. Hal ini yang sering disebut peralihan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Peralihan sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi ini mengharuskan pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan daerahnya.

Kebijakan keuangan daerah selama ini dilaksanakan dengan meningkatkan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi. Dengan meningkatnya penerimaan daerah, selain akan memperbaiki struktur pembiayaan daerah, juga akan memperkecil peranan sumber pembiayaan baik yang berasal dari pemerintah pusat atau pinjaman dari luar negeri. Untuk lebih meningkatkan kemandirian dalam membiayai kegiatan di daerah, maka akan terus ditingkatkan perolehan

pendapatan dari pajak melalui upaya mengefisiensikan pemungutan dari setiap pajak dan retribusi dengan mempertimbangkan potensi yang seharusnya dapat dicapai.

Pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, pendapatan daerah yang berasal dari pembagian PAD, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan lainnya yang merupakan PAD yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan daerah yang sah. PAD itu sendiri terdiri dari pajak dan retribusi daerah, keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan PAD yang lain. PAD yang terbesar berasal dari pajak daerah yang dipungut dari masyarakat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada pemerintah daerah, kemudian PAD yang lain adalah retribusi daerah.

Sesuai dengan prinsip dalam kebijakan ekonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan tugas dan kewenangannya, maka akan terus diupayakan agar PAD menjadi andalan dalam APBD DKI Jakarta. Secara umum ada empat komponen pendapatan dalam PAD yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD dan pendapatan dinas-dinas daerah. Dari keempat komponen tersebut, komponen pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang paling utama. Pada beberapa tahun belakangan ini sumber dari pajak daerah mengalami peningkatan.

Beberapa jenis pajak daerah yang secara potensi mampu memberikan kontribusi cukup besar adalah pajak biaya balik nama/kendaraan bermotor; pajak kendaraan bermotor; pajak hotel dan restoran; pajak reklame; pajak hiburan dan pajak penerangan jalan. Secara keseluruhan jenis pajak ini memberi kontribusi terhadap PAD DKI Jakarta.

Perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2003 tumbuh sebesar 4,39 persen, angka ini lebih tinggi dibanding keadaan tahun lalu yang tumbuh 3,99 persen. Sektor-sektor yang menunjukkan pertumbuhan tinggi pada periode tersebut adalah sektor pengangkutan dan komunikasi (5,79 persen), sektor listrik, gas dan air bersih (6,21 persen) dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (5,04 persen).

Pada sektor industri, kelompok semen dan barang galian bukan logam memberikan pertumbuhan terbesar (7,33 persen), disusul oleh kelompok industri pupuk, kimia, dan barang dari karet (sekitar 6,37 persen). Sementara pada sektor perdagangan, hotel dan restoran, subsektor restoran tumbuh sebesar 5,04 persen. Pada sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, subsektor bank tumbuh sebesar 4,29 persen.

**Tabel 1.1.**  
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 1993**  
**Menurut Lapangan Usaha**  
**1999-2003**  
**(juta rupiah)**

No.	Lapangan Usaha	1999	2000	2001	2002*)	2003*)
1.	Pertanian	116.867	115.742	113.408	111.151	106.568
2.	Industri Pengolahan (Tanpa Migas)	12.391.061	12.875.191	13.320.467	13.756.925	14.172.353
3.	Listrik, Gas dan air bersih	1.161.177	1.245.846	1.299.449	1.366.260	1.451.095
4.	Bangunan	6.404.740	6.535.392	6.639.223	6.834.029	7.068.436
5.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	13.550.295	14.166.037	14.799.488	15.549.392	16.333.551
6.	Pengangkutan dan Komunikasi	5.402.572	5.736.012	6.047.202	6.391.477	6.761.689
7.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	12.681.994	13.285.022	13.740.441	14.245.887	14.921.969
8.	Jasa-jasa	5.506.518	5.735.176	5.908.579	6.083.709	6.347.039
	Produk Domestik Regional Bruto	57.215.223	59.694.418	61.868.256	64.338.830	67.162.700

Sumber: BPS Propinsi DKI Jakarta

\*) Angka Perbaikan

\*\*\*) Angka Sementara

**Tabel 1.2.**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga**  
**Konstan menurut Lapangan Usaha**  
**(1999-2003)**

No	Lapangan Usaha	1999	2000	2001	2002*)	2003*)
1.	Pertanian	11,33	-0,96	-2,02	-1,99	-4,12
2.	Industri Pengolahan (Tanpa Migas)	2,63	3,91	3,46	3,28	3,02
3.	Listrik, Gas dan air bersih	5,25	7,29	4,30	5,14	6,21
4.	Bangunan	-2,80	2,04	1,59	2,93	3,43
5.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	0,62	4,54	4,47	5,07	5,04
6.	Pengangkutan dan Komunikasi	2,17	6,17	5,43	5,69	5,79
7.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	-6,17	4,75	3,43	3,68	4,75
8.	Jasa-jasa	5,09	4,15	3,02	2,96	4,33
	Produk Domestik Regional Bruto	-0,29	4,33	3,64	3,99	4,39

Sumber: BPS Propinsi DKI Jakarta

\*) Angka Perbaikan

\*\*\*) Angka Sementara

Dalam hal ini pajak bagi pemerintah daerah berperan sebagai sumber pendapatan (*budgetary function*) yang utama dan juga sebagai alat pengatur (*regulatory function*). Pajak sebagai pendapatan daerah terbesar digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah seperti: pengeluaran-pengeluaran untuk membiayai administrasi pemerintah, membangun dan memperbaiki infrastruktur, menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, membiayai anggota polisi, dan membiayai kegiatan pemerintah daerah dalam menyediakan kebutuhan-kebutuhan yang tidak dihasilkan oleh swasta.

Berangkat dari hal tersebut maka dalam studi ini akan mengamati seberapa besar pengaruh reformasi terhadap Penerimaan Pajak Daerah. Termasuk diantaranya memasukkan beberapa variabel yang berhubungan dengan Penerimaan Pajak Daerah. Oleh karena itu permasalahan yang nantinya akan dibahas lebih lanjut dalam tulisan ini dengan mengambil judul “ **PENGARUH REFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH PROPINSI DKI JAKARTA**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini masalah yang akan dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah variabel pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak daerah?
2. Apakah variabel tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap penerimaan pajak daerah?
3. Apakah variabel jumlah wajib pajak berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak daerah?
4. Apakah variabel dummy(sebelum dan sesudah reformasi perpajakan) mempengaruhi penerimaan pajak daerah ?



5. Apakah variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi dan jumlah wajib pajak dan variable dummy(reformasi perpajakan) yang diuji secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk menganalisa pertumbuhan ekonomi daerah dalam mempengaruhi penerimaan pajak daerah.
2. Untuk menganalisa tingkat inflasi daerah dalam mempengaruhi penerimaan pajak daerah.
3. Untuk menganalisa jumlah wajib pajak daerah dalam mempengaruhi penerimaan pajak daerah.
4. Untuk mengetahui seberapa besar variabel dummy(sebelum dan sesudah reformasi perpajakan) terhadap penerimaan pajak daerah.
5. Untuk menganalisa secara bersama-sama variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi jumlah wajib pajak dan reformasi perpajakan dalam mempengaruhi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

1. Sebagai masukan pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah daerah DKI Jakarta dalam menentukan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan penerimaan pajak daerah.
2. Sebagai sumber informasi bagi peneliti yang lain yang berminat pada masalah yang sama dan analisis yang dapat diperoleh dapat menjadi informasi bagi pihak yang memerlukan.
3. Sebagai bahan perbandingan dari penelitian yang telah ada, serta bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sejenis.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

##### **BAB II. GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN**

Bab ini merupakan uraian deskripsi, gambaran secara umum atas subyek penelitian.

### **BAB III. TELAAH PUSTAKA**

Bab ini berisi pendokumentasian dan pengkajian hasil penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada area yang sama sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan bagi peneliti.

### **BAB IV. LANDASAN TEORI DAN HIPOTESA**

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan untuk mendeteksi permasalahan yang akan diteliti. Sehingga diharapkan penelitian ini tidak keluar dari jalur akademis.

### **BAB V. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang di gunakan dalam penelitian dan data-data yang di gunakan beserta sumber data.

### **BAB VI. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Berisi analisis data yang disajikan untuk selanjutnya digunakan untuk menguji dan meneliti ketepatan model, dan penjelasan-penjelasan dari hasil perhitungan yang telah dilakukan.

### **BAB VII. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI**

Merupakan bagian terakhir dari penelitian ini, dengan penarikan kesimpulan dari hasil perhitungan serta saran-saran sesuai dengan hasil analisis penelitian.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM SUBYEK PENELITIAN

#### 2.1. Sejarah Umum Mengenai DKI Jakarta

Jakarta bermula dari sebuah Bandar kecil di muara Sungai Ciliwung sekitar 500 tahun silam. Selama berabad-abad kemudian kota Bandar ini berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai. Pengetahuan awal mengenai Jakarta terkumpul sedikit melalui berbagai prasasti yang di temukan di kawasan bandar tersebut. Keterangan mengenai kota Jakarta sampai dengan awal kedatangan para penjajah Eropa dapat di katakan sangat sedikit.

Laporan para penulis Eropa abad ke-16 menyebutkan sebuah kota bernama Kalapa, yang tampaknya menjadi bandar utama bagi sebuah kerajaan Hindu bernama Sunda, beribu kota Pajajaran, terletak sekitar 40 kilometer di pedalaman, dekat dengan kota Bogor sekarang. Bangsa Portugis merupakan rombongan besar orang-orang Eropa pertama yang datang ke Bandar Kalapa. Kota ini kemudian diserang oleh seorang muda usia, bernama Fatahillah, dari sebuah kerajaan yang berdekatan dengan Kalapa. Fatahillah mengubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta pada 22 Juni 1527. Tanggal inilah yang kini di peringati sebagai lahir kota Jakarta. Orang-orang Belanda datang pada akhir abad ke-16 dan kemudian menguasai Jayakarta.

Nama Jayakarta diganti menjadi Batavia. Keadaan alam Batavia yang berawa-rawa mirip dengan negeri Belanda, tanah air mereka. Mereka pun membangun kanal-kanal untuk melindungi Batavia dari ancaman banjir. Kegiatan

pemerintahan kota dipusatkan di sekitar lapangan yang terletak sekitar 500 meter dari Bandar. Mereka membangun balai kota yang anggun, yang merupakan kedudukan pusat pemerintahan kota Batavia. Lama-kelamaan kota Batavia berkembang ke arah selatan. Pertumbuhan yang pesat mengakibatkan keadaan lingkungan cepat rusak, sehingga memaksa penguasa Belanda memindahkan pusat kegiatan pemerintahan ke kawasan yang lebih tinggi letaknya. Wilayah ini dinamakan Weltevreden. Semangat Nasionalisme Indonesia dicanangkan oleh para mahasiswa di Batavia pada awal abad ke-20.

Sebuah keputusan bersejarah yang dicetuskan pada tahun 1928 yaitu Sumpah Pemuda berisi tiga buah butir pernyataan, yaitu bertanah air satu, berbangsa satu, dan menjunjung bahasa persatuan Indonesia. Selama masa pendudukan Jepang (1942-1945), nama Batavia diubah lagi menjadi Jakarta. Pada Tanggal 17 Agustus 1945 Ir Soekarno membacakan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Jakarta dan Sangsaka Merah Putih untuk pertama kalinya dikibarkan. Kedaulatan Indonesia secara resmi diakui pada tahun 1949. Pada saat itu juga Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada tahun 1966, Jakarta memperoleh nama resmi Ibukota Republik Indonesia. Hal ini mendorong laju pembangunan gedung-gedung perkantoran pemerintah dan kedutaan negara sahabat. Perkembangan yang cepat memerlukan sebuah rencana induk untuk mengatur pertumbuhan Kota Jakarta. Sejak tahun 1966, Jakarta berkembang dengan mantap menjadi sebuah metropolitan modern. Kekayaan budaya berikut pertumbuhannya yang dinamis merupakan

sumbangan penting bagi Jakarta menjadi salah satu metropolitan terkemuka pada abad ke-21.

## **2.2 Keadaan Geografis DKI Jakarta.**

Kota Jakarta merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata  $\pm 7$  meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi  $6^{\circ} 12'$  Lintang Selatan dan  $106^{\circ} 48'$  Bujur Timur. Luas wilayah propinsi DKI Jakarta berdasarkan SK Gubernur Nomor 1227 tahun 1989 adalah berupa daratan seluas  $661,52 \text{ km}^2$  dan berupa lautan seluas  $6.977,5 \text{ km}^2$ . Wilayah DKI memiliki tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu dan sekitar 27 buah sungai/kanal/saluran yang di gunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan.

Di sebelah utara membentang pantai dari barat sampai ke timur sepanjang  $\pm 35 \text{ km}$  yang menjadi tempat bermuaranya 9 buah sungai dan 2 buah kanal, sementara di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan wilayah propinsi Jawa Barat, sebelah barat berbatasan dengan propinsi Banten, sedangkan di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.

Wilayah administrasi propinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kotamadya dan satu Kabupaten administrasi yaitu kotamadya Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Utara masing-masing dengan luas daratan seluas  $145,73 \text{ km}^2$ ,  $47,90 \text{ km}^2$ ,  $187,73 \text{ km}^2$ ,  $126,15 \text{ km}^2$  dan  $154,01 \text{ km}^2$  serta Kabupaten Pulau Seribu.

Keadaan iklim kota Jakarta secara umum beriklim panas dengan suhu maksimum udara berkisar 28,7 °C pada siang hari dan usaha minimum udara berkisar 26 °C pada malam hari. Sementara itu curah hujan sepanjang tahun 2002 mencapai 2.288,9 mm dengan tingkat kelembaban udara mencapai 76,4% dan kecepatan angin rata-rata mencapai 3,5 m/det.

Daerah di sebelah selatan dan timur Jakarta terdapat rawa dengan total luas mencapai 96,5 Ha. Kedua wilayah ini cocok digunakan sebagai daerah resapan air dengan iklimnya yang lebih sejuk, sehingga ideal dikembangkan sebagai wilayah penduduk. Kegiatan industri lebih banyak terdapat di Jakarta Utara dan Jakarta Timur sedangkan kegiatan usaha dan perkantoran banyak terdapat di Jakarta Barat , Jakarta selatan dan Jakarta Pusat.

**Tabel 2.1**

**Luas Wilayah Propinsi DKI Jakarta Dirinci Menurut Kotamadya  
Tahun 2003**

No	Kotamadya	Luas wilayah (km <sup>2</sup> )
1	Jakarta Selatan	145,73
2	Jakarta Timur	187,73
3	Jakarta Pusat	47,90
4	Jakarta Barat	126,15
5	Jakarta Utara	142,30
6	Kepulauan Seribu	11,71
<b>Propinsi DKI Jakarta</b>		<b>661,52</b>

Sumber Data : Jakarta dalam angka (BPS Jakarta:2003)

\*) Registrasi penduduk pertengahan tahun 2003

### 2.3 Kependudukan.

Kependudukan adalah faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan di daerah DKI Jakarta karena penduduk merupakan sarana dari pembangunan tersebut selain menjadi pelaksanaan didalam pembangunan itu. Dari dasar pemikiran ini, pembangunan masalah kependudukan diarahkan pada pengendalian kuantitas, kualitas, dan pengarahan mobilitas penduduk.

Dari data tabel di atas disebutkan bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta berjumlah 7.456.931 jiwa yang terdiri dari 3.864.109 jiwa dari laki-laki dan 3.592.822 jiwa dari perempuan dengan sex ratio 107 yang berarti dari 107 jiwa dari penduduk laki-laki terdapat 100 jiwa dari penduduk perempuan yang tersebar pada lima kotamadya dan satu kabupaten.

Penduduk yang terbanyak ada di kotamadya Jakarta Timur yang berjumlah 2.094.586 jiwa yang terdiri dari 1.112.906 jiwa laki-laki dan 981.680 jiwa perempuan, dan yang terendah jumlah penduduknya ada di Kabupaten Kepulauan Seribu yang berjumlah 18.923 jiwa yang terdiri dari 9.622 jiwa laki-laki dan 9.301 jiwa perempuan.



Tabel 2.2

**Jumlah dan Kepadatan Penduduk Propinsi DKI Jakarta Tahun 2003**

No	Kotamadya	Jenis Kelamin		Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Km <sup>2</sup> )
		Laki-laki	Perempuan		
1	Jakarta Selatan	892.180	809.375	1.701.555	11.676
2	Jakarta Timur	1.112.906	981.680	2.094.586	11.157
3	Jakarta Pusat	452.754	445.187	897.941	18.746
4	Jakarta Barat	795.844	771.727	1.567.571	12.426
5	Jakarta Utara	600.803	575.552	1.176.355	8.267
6	Kepulauan Seribu	9.622	9.301	18.923	1.616
<b>Jumlah</b>		<b>3.864.109</b>	<b>3.592.822</b>	<b>7.456.931</b>	<b>11.272</b>

Sumber data : Jakarta dalam angka (BPS Jakarta:2003)

\*) Registrasi penduduk pertengahan tahun 2003

#### 2.4 Keadaan PAD dan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta.

Didalam membiayai seluruh kegiatan pemerintahan DKI Jakarta PEMDA DKI Jakarta sangat memperhatikan sekali masalah PAD karena PAD sangat berguna bagi kelangsungan berjalannya sebuah pemerintahan di DKI Jakarta, sama halnya dengan PEMDA di kota-kota lainya di Indonesia permasalahan PAD sangat diperhatikan sekali karena PAD merupakan sumber pendanaan.

Di Jakarta Pendapatan asli Daerahnya dari tahu ke tahun mengalami kenaikan yang cukup baik, PAD yang sangat penting diperhatikan oleh PEMDA DKI Jakarta adalah dari segi penerimaan Pajak Daerah karena PEMDA menyadari bahwa DKI Jakarta tidak memiliki kekayaan alam yang mendukung bagi penerimaan daerah. Maka dari itu, penerimaan Pajak Daerah menjadi faktor penting dalam membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan PEMDA DKI Jakarta.

Pendapatan asli daerah DKI Jakarta pada tahun 2003 sebesar Rp 5.261.851,4 juta dari jumlah itu PAD DKI Jakarta mengalami kenaikan karena pada tahun 2002 PAD DKI Jakarta berjumlah Rp 4.509.529,7 juta. Sedangkan jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2003 sebesar Rp 4.401.724,7 juta jumlah tersebut mengalami kenaikan karena penerimaan pajak daerah pada tahun 2002 sebesar Rp 3.703.572,7 juta. Dilihat dari jumlah PAD dan jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2002 dan 2003 diketahui bahwa penerimaan pajak daerah pada kedua tahun tersebut merupakan sumbangan terbesar bagi PAD DKI Jakarta sekitar 90% dari jumlah PAD yang ada.

Didalam memberi sumbangsih bagi PAD penerimaan Pajak Daerah yang terbesar bagi DKI Jakarta diperoleh dari penerimaan pajak dari kendaraan motor dan pajak BBN kendaraan motor karena pada tahun 2003 ini jumlah penerimaan pajak daerah dari pajak kendaraan motor dan BBN kendaraan motor sebesar Rp 1.410.353 juta dan Rp 1.762.107 juta, dilihat dari jumlah tersebut diketahui bahwa kedua pajak tersebut merupakan penyumbang terbesar bagi penerimaan pajak daerah sekitar 70% dari jumlah penerimaan pajak daerah pada tahun 2003.

**Tabel 2.3**  
**Penerimaan PAD dan Pajak Daerah Tahun 2000-2003**  
**(Juta Rp)**

Sumber Penerimaan	Tahun 2000	Tahun 2001	Tahun 2002	Tahun 2003
PAD	2.439.285,0	3.644.150,8	4.509.529,7	5.261.851,4
Pajak Daerah	1.718.274,1	3.056.748,1	3.703.572,6	4.401.724,7
Pajak kendaraan Motor	507.984,2	871.168,9	1.058.527,2	1.410.353,5
BBN Kendaraan Motor	1.031.646,1	1.359.769,7	1.514.316,5	1.762.107,8
Pajak Bahan Kendaraan Motor	-	-	-	215.380,0
Pajak Hotel Dan Restoran	290.646,6	438.189,9	499.472,5	549.238,4
Pajak Hiburan	45.596,2	65.587,3	82.157,5	99.323,5
Pajak Reklame	54.819,0	66.112,1	91.406,2	100.920,9
Pajak Penerangan Jalan	75.748,9	135.394,8	189.203,0	200.804,1
Pajak Lain-lain	111.833,5	120.524,4	268.489,8	63.596,5

Sumber data : Jakarta dalam angka (BPS Jakarta:2003)

### **BAB III**

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Penelitian tentang pajak daerah adalah penelitian yang dilakukan oleh Enda Wijaya (2003) dengan mengambil judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Yogyakarta)”. Dalam penelitian tersebut menganalisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah wajib pajak, dan tarif pajak rata-rata.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Penerimaan pajak daerah dikatakan tinggi apabila di suatu daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan penerimaan pajak daerah dikatakan rendah apabila di suatu daerah tersebut memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah karena tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi dilihat dari pendapatan per kapita tiap penduduk di daerah tersebut. Faktor lain yang mempengaruhi adalah tingkat inflasi, karena semakin tinggi tingkat inflasi maka penerimaan pajak daerah semakin rendah dan sebaliknya.

Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang secara umum dan terjadi secara terus menerus. Apabila tingkat inflasi tinggi bukan tidak mungkin penerimaan pajak daerah akan rendah. Hal ini dikarenakan pendapatan wajib pajak berkurang.

Pengujian dalam penelitian Enda Wijaya (2003) menggunakan regresi linear berganda dengan pengujian statistik secara individu dan serempak. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh yang timbul terhadap variabel independen dengan fungsi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Dimana Y = penerimaan pajak daerah

$X_1$  = pertumbuhan ekonomi daerah (Persen)

$X_2$  = tingkat inflasi (Persen)

$X_3$  = jumlah wajib pajak (Orang dan Lembaga)

$X_4$  = tarif pajak rata-rata (Persen)

Dalam analisis data tersebut menghasilkan:

$$Y = 0,000000078 + 0,000057 X_1 - 1004701 X_2 - 88938,8 X_3 + 0,00000044X_4$$

Dari hasil perhitungan data dari tahun 1997-2000 tersebut diketahui bahwa variabel independen pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif, variabel independen tingkat inflasi berpengaruh negatif, variabel independen jumlah wajib pajak berpengaruh negatif dan variabel independen tarif pajak rata-rata berpengaruh positif. Dari uraian penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan tarif pajak rata-rata berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah dan variabel tingkat inflasi dan jumlah wajib pajak tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Selanjutnya penelitian Salma Sulthan (1997) mengenai “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pajak Pembangunan I dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten Dati II Semarang)” tahun 1980 / 1981-1995 / 1996 dengan model ekonometri :

$$PPI = F (X_1, X_2, X_3, \varepsilon)$$

Dimana PPI = realisasi pajak pembangunan I

$X_1$  = jumlah PDRB per kapita

$X_2$  = jumlah wisatawan nusantara

$X_3$  = jumlah wisatawan asing.

Dari penelitian tersebut diketahui bahwa pendapatan per kapita secara signifikan dapat mempengaruhi realisasi pajak pembangunan I. Untuk variabel jumlah wisatawan nusantara secara signifikan dapat mempengaruhi realisasi pajak pembangunan I. Untuk variabel jumlah wisatawan asing secara signifikan mempengaruhi realisasi pajak pembangunan I. Dari hasil perhitungan tersebut disimpulkan bahwa semua variabel independen yang dihitung di atas diketahui berpengaruh secara positif di dalam mempengaruhi realisasi pajak pembangunan I dalam mendukung penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selanjutnya penelitian M.Numan Na'iem yang diberi judul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi D.I.Yogyakarta” dengan menggunakan persamaan:

$$LY = \beta_0 + \beta_1 LX_1 + \beta_2 LX_2 + \beta_3 LX_3$$

$Y$  = Realisasi Penerimaan pajak Kendaraan Bermotor

$X_1$  = PDRB Perkapita Riil

$X_2$  = Jumlah Penduduk

$X_3$  = Tingkat Inflasi

Hasil regresinya:

$$LY = \beta_0 + \beta_1 LX_1 + \beta_2 LX_2 + \beta_3 LX_3$$

$$LY = (-124,56109) + (0,7045525)X_1 + (16,291709)X_2 - 0,0455712) X_3$$

$$T_{stat} = \beta_0 (-18,195267) + \beta_1 (2,9656304) + \beta_2 (12,998421) - \beta_3 (-2,4399761)$$

- Dari perhitungan statistik dapat di ketahui bahwa nialai  $t$  Hit >  $t$  Tabel yaitu  $2,9656304 > 2,110$ . Ini berarti  $H_0$  ditolak atau PDRB Riil mempengaruhi besarnya Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
- Dari perhitungan statistik dapat di ketahui bahwa nialai  $t$  Hit >  $t$  Tabel yaitu  $12,998421 > 2,110$ . Ini berarti  $H_0$  ditolak atau Jumlah Penduduk mempengaruhi besarnya Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
- Dari perhitungan statistik dapat di ketahui bahwa nialai  $t$  Hit >  $t$  Tabel yaitu  $2,4399761 > 2,110$ . Ini berarti  $H_0$  ditolak atau Tingkat Inflasi mempengaruhi besarnya Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor.
- $R^2$  persamaan regresi  $0,99721$  artinya bahwa variasi naik turunnya Realisasi Penerimaan Pajak kendaraan Bermotor dipengaruhi sebesar 99% oleh PDRB

Perkapita Riil, Jumlah penduduk, Tingkat Inflasi. Sedangkan 1% sisanya di pengaruhi oleh faktor lainya.

Peneliti berikutnya Kukilo Bagaskoro yang diberi judul “Analisis faktor-faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah pemerintah DKI Jakarta” dengan menggunakan persamaan:

$$\text{Ln}Y = \beta_0 + \beta_1\text{Ln}X_1 + \beta_2\text{Ln}X_2 + \beta_3\text{Ln}X_3 + \beta_4\text{Ln}X_4$$

Y = Variabel dependen (PAD tahun yang bersangkutan).

X<sub>1</sub> = PDRB perkapita DKI Jakarta.

X<sub>2</sub> = Jumlah Wisatawan asing DKI Jakarta.

X<sub>3</sub> = Jumlah kendaraan bermotor.

X<sub>4</sub> = Jumlah penduduk DKI Jakarta.

Hasil regresinya:

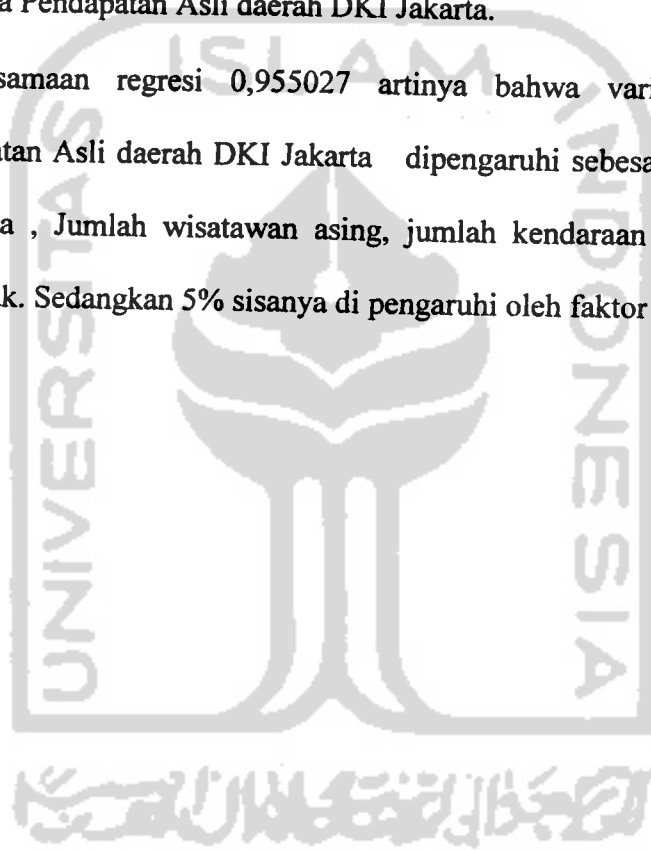
$$\text{Ln}Y = \beta_0 + \beta_1\text{Ln}X_1 + \beta_2\text{Ln}X_2 + \beta_3\text{Ln}X_3 + \beta_4\text{Ln}X_4$$

$$\text{Ln}Y = (-119,2526) + (2,818325) X_1 + (0,890479) X_2 + (0,860470) X_3 + (4,451211) X_4$$

- Dari perhitungan statistik dapat di ketahui bahwa nialai t Hit > t Tabel yaitu 7,514105 > 2,131. Ini berarti Ho ditolak atau PDRB perkapita mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli daerah DKI Jakarta.
- Dari perhitungan statistik dapat di ketahui bahwa nialai t Hit > t Tabel yaitu 4,778668 > 2,131. Ini berarti Ho ditolak atau Jumlah wisatawan asing mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli daerah DKI Jakarta.



- Dari perhitungan statistik dapat di ketahui bahwa nialai  $t_{Hit} > t_{Tabel}$  yaitu  $5,691330 > 2,131$ . Ini berarti  $H_0$  ditolak atau Jumlah kendaraan bermotor mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli daerah DKI Jakarta.
- Dari perhitungan statistik dapat di ketahui bahwa nialai  $t_{Hit} > t_{Tabel}$  yaitu  $2,96055 > 2,131$ . Ini berarti  $H_0$  ditolak atau Jumlah penduduk mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli daerah DKI Jakarta.
- $R^2$  persamaan regresi  $0,955027$  artinya bahwa variasi naik turunnya Pendapatan Asli daerah DKI Jakarta dipengaruhi sebesar 95% oleh PDRB Perkapita , Jumlah wisatawan asing, jumlah kendaraan bermotor, Jumlah penduduk. Sedangkan 5% sisanya di pengaruhi oleh faktor lainnya.



## BAB IV

### LANDASAN TEORI DAN HIPOTESA

#### 4.1 Sumber Keuangan Daerah

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana atau uang.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu :
  - a. Hasil pajak daerah.
  - b. Hasil retribusi daerah.
  - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset daerah dan jasa giro.
2. Dana Perimbangan, terdiri atas :
  - a. Bagian Daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan , dan penerimaan dari

sumber daya alam, yaitu penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam antara lain di bidang pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas bumi, kehutanan, dan perikanan.

- b. Dana alokasi umum.
- c. Dana alokasi khusus.
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah adalah antar lain hibah atau penerimaan dari Daerah Propinsi atau Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dan penerimaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelum dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah tahun 1999, sumber keuangan daerah, baik propinsi, kabupaten, maupun kotamadya menurut UU Nomor 5 Tahun 1974 adalah sebagai berikut :

1. Penerimaan Asli Daerah
2. Bagi hasil pajak dan non-pajak.
3. Bantuan pusat (APBN) untuk daerah tingkat I dan daerah tingkat II.
4. Pinjaman daerah.
5. Sisa lebih anggaran tahun lalu.
6. Lain-lain penerimaan daerah yang sah.

Beberapa usaha yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah antara lain adalah sebagai berikut (Iswardono, 1992, hal. 17) :

1. Perbaikan dan penyempurnaan struktur organisasi yang berkaitan dengan tugas di bidang pendapatan daerah baik di Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Diusahakan pelaksanaan pemungutan atas kendaraan bermotor yang dilaksanakan dalam satu tahap.
3. Penetapan besar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diserahkan kepada Pemerintah Daerah karena menyangkut penentuan nilai jual obyek pajak yang dapat dikaitkan dengan peta pengembangan daerah sehingga dapat diperkecil kemungkinan penetapan pajak yang lebih rendah.

#### **4.2 Pengertian Pajak Daerah**

##### **4.2.1. Definisi Pajak Daerah**

Menurut UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

*“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.*

#### 4.2.2 Jenis-jenis Pajak

Jenis-jenis pajak propinsi terdiri dari :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat dari perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat.

Jenis-jenis pajak kabupaten/kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel, yaitu pajak atas pelayanan hotel.
2. Pajak Restoran, yaitu pajak atas pelayanan restoran.
3. Pajak Hiburan, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan.

4. Pajak Reklame, yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, yaitu pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Parkir, yaitu pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Di samping jenis-jenis Pajak Daerah tersebut di atas, maka dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan jenis pajak lainnya yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Bersifat sebagai pajak bukan retribusi, berarti bahwa pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak;
2. Obyek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum berarti pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, dan

kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan;

3. Potensinya memadai, berarti hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya diperkirakan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah;
4. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, berarti bahwa pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintang arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor;
5. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat, berarti bahwa subyek dan obyeknya harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh Wajib Pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan dan kemampuan Wajib Pajak untuk memikul tambahan beban pajak;
6. Menjaga kelestarian lingkungan, berarti bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan sehingga pemungutan pajak tidak memberi peluang kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

Tabel 4.1

## Tarif pajak propinsi dan pajak kabupaten

No.	Propinsi	Tarif (%)	No.	Kabupaten/Kota	Tarif (%)
1.	PKB dan Kendaraan di Atas Air (PKB-KAA)	5.0	1.	Pajak Hotel	10.0
2.	BBNKB dan Kendaraan di Atas Air (BBNKB-KAA)	10.0	2.	Pajak Restoran	10.0
3.	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	5.0	3.	Pajak Hiburan	35.0
4.	Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3ABT dan AP)	20.0	4.	Pajak Reklame	25.0
			5.	Pajak Penerangan Jalan	10.0
			6.	Pajak Pengambilan Bahan Galian C	20.0
			7.	Pajak Parkir	20.0

Sumber: *Perpajakan di Indonesia*, 1995, Jakarta : Erlangga.

## 4.2.3. Surat ketetapan pajak daerah

Pajak daerah dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak. Dengan demikian ada dua cara pemungutan pajak, pertama dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang



dipersamakan, misalnya berupa karcis atau nota perhitungan. Sedangkan cara yang kedua dengan memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah.

Kewenangan Kepala Daerah yang pertama adalah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang meliputi :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,

Sebagai sarana penagihan apabila Wajib Pajak diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya yang terutang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya.

Kepala daerah berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dalam jangka waktu 5 tahun dalam hal :

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketetapan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
- b. Apabila Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
- c. Apabila kewajiban mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, yaitu penetapan

besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

2. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT)

Apabila setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data fiskal baru dan/atau data fiskal yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, maka kepala daerah dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan ini.

3. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

4. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPN)

Akan diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

5. Surat Tagihan Pajak Daerah

Dapat diterbitkan apabila :

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
- b. Dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;

- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Asumsi yang digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah adalah sebagai berikut (Harun Hamrolie, 1990, hal. 47) :

1. Potensi Wajib Pajak,
2. Potensi besarnya pajak yang ditetapkan,
3. Efektivitas pemungutan,
4. Tarif pajak,
5. Dasar pajak (tax base).

#### 4.3. Deskripsi mengenai variabel independen

##### 4.3.1 Tingkat Pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami penambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang

modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan mereka.

Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Pertambahan potensi memproduksi kerap kali lebih besar dari pertambahan produksi yang sebenarnya. Dengan demikian perkembangan ekonomi adalah lebih lambat dari potensinya.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat bernilai positif dan dapat pula bernilai negatif. Jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan positif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami peningkatan. Sedangkan jika pada suatu periode perekonomian mengalami pertumbuhan negatif, berarti kegiatan ekonomi pada periode tersebut mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari tujuan ekonomi makro. Hal ini didasari oleh tiga alasan. Pertama, penduduk selalu bertambah. Bertambahnya jumlah penduduk ini berarti angkatan kerja juga selalu bertambah. Pertumbuhan ekonomi akan mampu menyediakan lapangan kerja bagi angkatan kerja. Jika pertumbuhan

ekonomi yang mampu diciptakan lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja, hal ini mendorong terjadinya pengangguran. Kedua, selama keinginan dan kebutuhan selalu tidak terbatas, perekonomian harus selalu mampu memproduksi lebih banyak barang dan jasa untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan tersebut. Ketiga, usaha menciptakan pemerataan ekonomi (*economic stability*) melalui retribusi pendapatan (*income redistribution*) akan lebih mudah dicapai dalam periode pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

#### 4.3.2 Jumlah Wajib Pajak

Definisi Wajib Pajak menurut UU no. 34 tahun 2000 :

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

##### 4.3.2.1. Pungutan Pajak

Disadari atau tidak pada hakekatnya pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan terhadap seluruh rakyat di suatu daerah. Segala bentuk pungutan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebenarnya merupakan pengurangan hak rakyat oleh pemerintah. Oleh karena itu, dalam pemungutannya tidak boleh diskriminatif dan harus diupayakan bersifat adil. Dalam

perpajakan keadilan haruslah obyektif dan dapat dirasakan merata oleh rakyat. Atas dasar pemikiran tersebut maka diperlukan landasan berpikir dalam melakukan pemungutan pajak. Landasan berpikir yang mendasari pemungutan pajak ini dikenal dengan azas pemungutan pajak. Azas saja tidaklah cukup, perlu justifikasi yang melandasi konsep berpikir yang rasional dalam pelaksanaan pemungutan pajak tersebut, konsep inilah yang dikenal dengan teori pemungutan pajak.

#### 4.3.2.2. Asas Pemungutan Pajak

Menurut *Adam Smith* dalam bukunya *The Wealth of Nations* bahwa dalam pemungutan pajak agar diupayakan adanya *keadilan objektif*. Artinya, asas pemungutan yang mendasarinya bersifat *umum dan merata*. Asas pemungutan pajak ini dikenal *The Four Maxims* atau *Smith's Cannon*, yaitu:

- a. *Equality*, kesamaan dalam beban pajak, sesuai kemampuan wajib pajak.
- b. *Certainty*, dijalankan secara tegas, jelas dan pasti.
- c. *Convenience*, tidak menekan wajib pajak, membayar pajak dengan senang dan rela.
- d. *Economy*, biaya pemungutannya tidak lebih besar dari jumlah penerimaan pajaknya.

#### 4.3.2.3 Teori Pungutan Pajak

Teori pungutan pajak ada beberapa yaitu sebagai berikut :

##### *a. Teori Asuransi*

Pajak diasumsikan sebagai premi asuransi yang harus dibayar oleh masyarakat (tertanggung) kepada negara (penanggung). Kelemahan teori ini, jika rakyat mengalami kerugian seharusnya ada penggantian dari negara, kenyataannya tidak ada. Selain itu, besarnya pajak yang dibayar dan jasa yang diberikan tidak ada hubungan langsung.

##### *b. Teori Kepentingan*

Pajak dibebankan atas dasar kepentingan (manfaat) bagi masing-masing orang. Teori ini juga dikenal sebagai *Benefit Approach Theory*.

##### *c. Teori Daya Pikul*

Kesamaan beban pajak untuk setiap orang sesuai daya pikul masing-masing. Ukuran daya pikul ini dapat berupa penghasilan dan kekayaan atau pengeluaran seseorang. Teori ini dikenal sebagai *Ability to Pay Approach Theory*.

##### *d. Teori Bakti*

Pajak (kewajiban asli) merupakan bukti tanda bakti seseorang kepada negaranya.

*e. Teori Asas Daya Beli*

Dasar keadilan pemungutan pajak, pada kepentingan masyarakat bukan pada individu atau negara. Keadilan dipandang sebagai efek dari pemungutan pajak.

4.3.3. Tingkat Inflasi

4.3.3.1 Definisi Inflasi

Inflasi didefinisikan sebagai kecenderungan dari harga-harga untuk menaik secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua macam barang saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi kecuali kenaikan tersebut membawa dampak terhadap kenaikan harga sebagian besar barang-barang lain. Kecenderungan untuk menaik terus menerus berarti kenaikan harga selama satu musim atau selama satu periode waktu saja tidak dapat dikatakan sebagai inflasi, seperti misalnya kenaikan harga menjelang hari raya. Kata kecenderungan pada definisi inflasi tersebut perlu diperhatikan. Jika seandainya harga sebagian besar barang-barang ditentukan dan diatur oleh pemerintah, maka harga-harga yang dicatat adalah harga resmi yang diatur oleh pemerintah sehingga mungkin tidak menunjukkan kenaikan apapun, tapi mungkin dalam kenyataannya harga yang terjadi di masyarakat cenderung untuk terus naik.



#### 4.3.3.2. Penggolongan Inflasi

Penggolongan inflasi menurut laju inflasi per tahun:

- a. Inflasi ringan (di bawah 10% setahun)
- b. Inflasi sedang (antara 10%-30% setahun)
- c. Inflasi berat (antara 30%-100% setahun)
- d. Hiperinflasi (di atas 100% setahun)

Penggolongan atas dasar sebab terjadinya inflasi:

- a. *Demand pull inflation*, yaitu inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang terlalu kuat dan permintaan masyarakat ini tidak diimbangi dengan tersedianya barang yang disediakan oleh suatu perekonomian. Misalnya, bertambahnya pengeluaran pemerintah yang dibiayai dengan mencetak uang, bertambahnya permintaan luar negeri akan barang-barang ekspor atau juga karena bertambahnya investasi karena adanya kredit yang murah.
- b. *Cost push inflation*, yaitu inflasi yang timbul karena adanya kenaikan biaya produksi, misalnya karena adanya desakan serikat buruh untuk menaikkan tingkat upah minimum bagi karyawan suatu pabrik, atau naiknya harga bahan bakar minyak.

Penggolongan inflasi berdasarkan darimana inflasi berasal:

- a. *Domestic inflation* atau inflasi yang penyebabnya berasal dari dalam negeri. Inflasi jenis ini timbul karena adanya faktor-faktor dari dalam negeri yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga, misalnya pemerintah menambah jumlah uang yang beredar, adanya peperangan, bencana alam atau adanya kegagalan panen yang menyebabkan kekurangan bahan makanan pokok.
- b. *Imported inflation* atau inflasi yang penyebabnya berasal dari luar negeri. Inflasi jenis ini timbul karena adanya kenaikan harga barang-barang di luar negeri dan barang-barang tersebut diimpor ke dalam negeri.

#### 4.3.3.3. Dampak Inflasi terhadap Perekonomian

- a. Inflasi dapat mendorong penanaman modal spekulatif.

Pada masa inflasi, seseorang akan merasa lebih aman jika menginvestasikan modalnya dalam bentuk pembelian rumah atau barang berharga lain daripada melakukan investasi yang produktif. Kondisi ini tidak akan menaikkan investasi yang akan berdampak terhadap pendapatan nasional.

- b. Tingkat bunga meningkat dan akan mengurangi tingkat investasi.

Dalam kondisi inflasi biasanya pemerintah akan menaikkan tingkat bunga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Namun kenaikan tingkat bunga tersebut akan menyebabkan investor enggan melakukan investasi karena bunga pinjaman yang harus dibayarkan menjadi lebih tinggi. Pada kondisi ini, investor lebih suka menyimpan dana di bank dan memperoleh pendapatan dari bunga tabungan.

- c. Menimbulkan ketidakpastian mengenai keadaan ekonomi di masa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat lagi diramalkan dengan baik sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap perekonomian suatu negara.
- d. Menimbulkan masalah neraca perdagangan

Inflasi akan menyebabkan harga barang impor menjadi lebih murah daripada barang yang dihasilkan di dalam negeri, karena itu biasanya inflasi akan menyebabkan impor berkembang lebih cepat daripada perkembangan ekspor.

#### 4.3.3.4. Dampak Inflasi terhadap Individu dan Masyarakat

- a. Memperburuk distribusi pendapatan

Pada masa inflasi, nilai harta-harta tetap seperti tanah atau bangunan mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada inflasi,

sedangkan masyarakat berpendapatan rendah yang biasanya tidak memiliki harta tetap tersebut akan mengalami kemerosotan nilai pendapatan riilnya. Hal ini akan memperlebar ketidaksamaan distribusi pendapatan.

b. Pendapatan riil merosot

Sebagian besar tenaga kerja memiliki pendapatan nominal yang nilainya tetap. Dalam masa inflasi kenaikan harga barang-barang akan membuat pendapatan riil masyarakat menjadi turun.

4.3.4. Variabel Dummy (Reformasi perpajakan)

4.3.4.1 Definisi Reformasi.

Reformasi maknanya sangat luas, istilah reformasi sudah di pakai sejak dulu sekitar tahun 1950 dan 1960an yang berasal kata dari reform yang artinya perubahan institusional yang terstruktur dan berencana, yang di lakukan sesuai dengan tata aturan rumah tangga lembaga atau badan yang bersangkutan. Berbeda dengan revolusi yang merupakan perubahan yang mendadak dan samapi ke sendi-sendinya, yang di lakukan dengan tidak menepati tata aturan rumah tangga.

#### **4.4. Tinjauan variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen**

##### **4.4.1. Tingkat Pertumbuhan ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi daerah berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat suatu daerah bertambah dan kemakmuran masyarakat suatu daerah meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu daerah untuk menghasilkan barang dan jasa meningkat. Faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, sistem sosial dan sikap masyarakat, luas pasar sebagai pertumbuhan.

Dari kesimpulan tersebut didapat bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengetahui kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat di dalam meningkatkan produksi barang dan jasa. Pertumbuhan ekonomi meningkat, dikarenakan kegiatan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa meningkat. Hal tersebut akan mempengaruhi peningkatan penerimaan pendapatan riil masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menurun, disebabkan kegiatan ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa menurun. Hal tersebut akan

menyebabkan penurunan penerimaan pendapatan riil masyarakat. Sehingga pertumbuhan ekonomi daerah mempengaruhi penerimaan pajak daerah secara positif.

#### 4.4.2 Tingkat inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode lainnya dan berbeda pula dari satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam perekonomian yang pesat berkembang inflasi yang rendah tingkatannya dinamakan inflasi merayap yaitu inflasi yang berkisar antara 2-4 %, sedangkan inflasi yang lebih tinggi yaitu yang tingkatannya berkisar 5-10 %. Bilamana pada waktu peperangan atau ketidakstabilan politik, inflasi dapat mencapai tingkatan yang sangat tinggi yaitu dapat mencapai beberapa ratus atau ribu persen. Inflasi ini dinamakan hiper inflasi.

Adakalanya tingkat inflasi sangat tinggi dan adakalanya tingkat inflasi itu rendah seperti halnya pengangguran. Inflasi juga menimbulkan beberapa akibat buruk kepada individu masyarakat dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan, contohnya bilamana inflasi berakibat buruk kepada individu atau masyarakat maka pendapatan riil masyarakat akan berkurang. Hal ini dikarenakan pengeluaran setiap masyarakat bertambah akibat adanya inflasi. Bila hal tersebut terjadi

maka pengeluaran masyarakat untuk pembayaran pajak akan tersendat karena pendapatan masyarakat berkurang.

Dari hal-hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Artinya apabila tingkat inflasi tinggi maka penerimaan pajak daerah rendah dan apabila tingkat inflasi rendah maka penerimaan pajak daerah tinggi.

#### 4.4.3 Jumlah wajib pajak

Definisi pajak secara umum, pajak adalah :

“Turan negara yang dapat dipaksakan yang tentang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan dengan tidak dapat diprestasikan kembali yang langsung ditagih dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam menjalankan pemerintahan.”

Dari pengertian pajak di atas disimpulkan bahwa penerimaan pajak dipengaruhi oleh faktor yang sangat pokok yaitu adanya wajib pajak. Jadi, jumlah wajib pajak suatu daerah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di suatu daerah. Artinya bilamana jumlah wajib pajak meningkat maka penerimaan pajak daerah juga meningkat dan apabila jumlah wajib pajak menurun maka penerimaan pajak daerah juga menurun.

#### 4.4.4. Variabel Dummy (Reformasi perpajakan).

Reformasi merupakan salah satu topik yang menjadi pembahasan penting dan meluas di kalangan para cendekiawan. Masing-masing cendekiawan itu memberikan pandangan dan perspektif tersendiri mengenai reformasi. Sebagian merumuskan reformasi sebagai sebuah usaha untuk mengubah jalan sejarah ke arah kebaikan dan keberkatan. Namun, sebagian kalangan menggunakan reformasi dalam rangka merusak tata-nilai dan mengembangkan ketidaksejahteraan.

Dalam bahasa Arab, reformasi disebut sebagai *Islah* yang artinya mewujudkan kesejahteraan, pembaharuan, atau dan memperindah sesuatu. Dalam Al Quran, kata *islah* dipertentangkan dengan *afsad* atau *fasad* yang artinya keluar dari kondisi yang seimbang. Pertentangan kata *islah* dan *fasad* ini bisa dilihat dalam surah Al Baqarah ayat 11, Allah berfirman, “Dan bila dikatakan kepada mereka ‘Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi’, mereka menjawab ‘Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan’.” Dari kesimpulan tersebut bahwa Reformasi perpajakan dapat mewujudkan pembaharuan dalam artian perubahan yang terjadi pada penerimaan pajak daerah propinsi DKI Jakarta.



#### 4.5 Hipotesa Penelitian

Agar terciptanya pemahaman terhadap masalah-masalah yang dikemukakan dibuat beberapa hipotesa sebagai berikut :

1. Ada pengaruh yang signifikan (positif) antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan penerimaan pajak daerah.
2. Ada pengaruh yang signifikan (negatif) antara tingkat inflasi dengan penerimaan pajak daerah.
3. Ada pengaruh yang signifikan (positif) antara jumlah wajib pajak dengan penerimaan pajak daerah.
4. Ada pengaruh yang signifikan antara reformasi perpajakan terhadap penerimaan pajak daerah.
5. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, jumlah wajib pajak dan variabel dummy(reformasi) dengan variabel dependen yang diuji secara bersama-sama.

## BAB V

### METODE PENELITIAN

#### 5.1. Data yang diperlukan

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu Kantor Pajak Daerah (KPD), Dinas Pendapatan Daerah (DPD), dan Biro Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk data yang sudah jadi.

#### 5.2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bersifat kuantitatif dengan data yang digunakan adalah data time series. Sampel yang digunakan adalah data penerimaan pajak daerah (Y), pertumbuhan ekonomi daerah ( $X_1$ ), tingkat inflasi ( $X_2$ ), jumlah wajib pajak ( $X_3$ ) dan variable dummy reformasi perpajakan pada kurun waktu 1983 s.d 2003.

#### 5.3. Variabel Operasional.

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh secara langsung dari sumbernya yaitu Kantor pajak Daerah (KPD), Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA), dan Biro Pusat Statistik (BPS) dalam bentuk data yang sudah jadi.

### 1. Data Penerimaan Pajak daerah.

Data penerimaan pajak daerah di peroleh dari buku Jakarta dalam angka dari berbagai edisi yang di terbitkan oleh Badan Pusat Statistik DKI Jakarta yang dinyatakan dalam satuan Rupiah selama kurun waktu 1983-2003. Data ini merupakan variable dependen yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta.

### 2. Data Pertumbuhan Ekonomi.

Data pertumbuhan ekonomi diperoleh dari jurnal perekonomian DKI Jakarta yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik dari berbagai edisi yang dinyatakan dalam satuan persen (%) selama kurun waktu 1983-2003. Data ini merupakan data variable independen, data Pertumbuhan ekonomi diukur dari perkembangan Pendapatan Domestik Bruto pada harga tetap.

### 3. Data Tingkat Inflasi.

Data tingkat inflasi diperoleh dari jurnal yang di terbitkan oleh Badan Pusat Statistik dari berbagai edisi yang dinyatakan dalam satuan persen (%) selama kurun waktu 1983-2003. Data ini merupakan data variable independen, data tingkat inflasi dihitung berdasarkan pola konsumsi masyarakat perkotaan dari berbagai jenis komoditi yang ada dalam paket komoditi dan perkembangan harga dari masing-masing komoditi yang ada dalam paket komoditi.

#### 4. Data Jumlah wajib Pajak.

Data jumlah wajib pajak diperoleh dari berbagai sumber yaitu Kantor Pajak Daerah (KPD), Kantor DISPENDA DKI Jakarta yang dinyatakan dalam satuan orang/lembaga selama kurun waktu 1983-2003. Data ini merupakan data variable independen.

#### 5. Data variabel dummy(reformasi perpajakan).

Data variabel dummy di peroleh berdasarkan sebelum dan sesudah reformasi. 0 masa sebelum reformasi  $< 2001$  dan 1 masa setelah reformasi  $> 2001$ .

### 5.4. Metode Analisis Data

#### 5.4.1. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif adalah metode analisis dengan cara mendiskripsikan faktor-faktor yang berhubungan dengan permasalahan yang dimaksud. Pada metode ini penulis berusaha menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah.

#### 5.4.2. Analisis kuantitatif

Analisa ini bersifat hitungan dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisa data yang berujud angka. Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel-variabel independen (pertumbuhan ekonomi daerah, tingkat inflasi, dan jumlah wajib pajak) terhadap variabel

dependen (penerimaan pajak daerah) digunakan model ekonometrika. Model dasar yang digunakan dari persamaan estimasi adalah model OLS (Ordinary Least Squares). Untuk menentukan model yang dipakai menggunakan bentuk linier atau log-linier terlebih dulu dilakukan uji specification model dengan uji Mackinnon, White, dan Davidson (MWD test). Model yang akan diuji sebagai berikut:

Model pertama persamaan bentuk linier:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 D_t + \varepsilon$$

Model kedua persamaan bentuk log linier

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \beta_4 D_t + \varepsilon$$

Keterangan :

$Y$  = Penerimaan pajak daerah (Rupiah)

$X_1$  = Pertumbuhan ekonomi daerah (Persen)

$X_2$  = Tingkat inflasi (Persen)

$X_3$  = Jumlah wajib pajak (Orang dan Lembaga)

$D_t$  = Variabel dummy = 0 masa sebelum reformasi perpajakan < 2001

1 masa setelah reformasi perpajakan > 2001

$\varepsilon$  = variabel pengganggu

$\beta_0$  = konstanta regresi

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = koefisien regresi

Proses analisis yang akan dilakukan terdiri dari pengujian variabel-variabel independen secara individu, yaitu pengujian signifikansi variabel secara individual, pengujian variabel-variabel penjelas (independen) secara bersama-sama serta perhitungan pengujian asumsi klasik dari regresi persamaan penerimaan pajak daerah.

#### 5.4.2.1. Pengujian statistik

Pengujian pertama dilakukan dengan t-statistik, uji t-statistik dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Dalam uji t-statistik ini digunakan hipotesa sebagai berikut :

a. Pengujian terhadap koefisien variabel pertumbuhan ekonomi

$H_0 : \beta_1 = 0$  (maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen)

$H_a : \beta_1 > 0$  (maka variabel independen berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel dependen)

Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (sisi positif). Dengan tingkat signifikansi 5% secara individu variabel pertumbuhan ekonomi ( $X_1$ ) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta (Y).

b. Pengujian terhadap koefisien variabel tingkat inflasi

$H_0 : \beta_1 = 0$  (maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen)

$H_a : \beta_1 < 0$  (maka variabel independen berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap variabel dependen)

Jika  $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (sisi negatif). Dengan tingkat signifikansi sebesar 5% secara individu variabel tingkat inflasi ( $X_2$ ) berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta (Y).

c. Pengujian terhadap koefisien variabel jumlah wajib pajak

$H_0 : \beta_1 = 0$  (maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen)

$H_a : \beta_1 > 0$  (maka variabel independen berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel dependen)

Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (sisi positif). Dengan tingkat signifikansi 5% secara individu variabel jumlah pajak ( $X_3$ ) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta (Y).

d. Pengujian terhadap koefisien variabel dummy.

$H_0 : \beta_1 = 0$  (maka variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen)

$H_a : \beta_1 > 0$  (maka variabel independen berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap variabel dependen)

Jika  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima (sisi positif). Dengan tingkat signifikansi 5% secara individu variabel dummy ( $D_i$ ) berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap penerimaan pajak daerah di DKI Jakarta ( $Y$ ).

Dimana  $\beta_1$  adalah koefisien variabel independen ke-1 adalah nilai parameter hipotesis biasanya nilai  $b$  dianggap = 0. Artinya tidak ada pengaruh variabel  $X_1$  terhadap  $Y$ . Apabila  $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$  maka pada tingkat kepercayaan tertentu, koefisien yang diuji secara nyata berbeda dengan (0) atau uji t-statistik tersebut signifikan,  $H_0$  ditolak.

Nilai t-hitung dirumuskan sebagai berikut :

$$t\text{-hitung} = \frac{\beta_1 - 0}{Se(\beta_1)}$$

Keterangan :

$\beta_1$  = Koefisien regresi variabel ke-1

$Se$  = Standar error dari variabel independen ke-1



Pengujian kedua yaitu pengujian variabel-variabel independen secara bersama-sama dapat dilakukan dengan uji F-test. Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Pengujian melalui F-test ini, digunakan hipotesa sebagai berikut :

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$  (variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen)

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq \beta_4 \neq 0$  (variabel independen mempengaruhi variabel dependen)

Pengujian ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus:

$$F\text{-test} = \frac{ESS/(k-1)}{RSS/(N-k)}$$

$$F\text{-test} = F_{\alpha} \text{ df } (k-1) / (N-1)$$

Keterangan :

ESS = Jumlah kuadrat yang dijelaskan

RSS = Jumlah kuadrat residual

k = Jumlah variabel

N = Jumlah data

$\alpha$  = Tingkat signifikansi

Jika  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ , dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel-variabel independen (penjelas) tersebut mempengaruhi variabel dependen, yang berarti  $H_0$  ditolak. Alternatif langkah kedua untuk pengujian ini adalah melalui koefisien determinasi. Pengujian ini ditujukan untuk melihat kemampuan variabel-variabel penjelas dalam menerangkan variabel terkaitnya. Dan ketepatan estimasi koefisien determinasi yang semakin besar (mendeteksi satu) menunjukkan bahwa hasil estimasi mendekati keadaan yang sebenarnya.

#### 5.4.2.2 Pengujian Asumsi Klasik.

##### 5.4.2.2.1 Pengujian Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan dimana variabel pengganggu pada periode tertentu berkorelasi dengan variabel gangguan pada periode lain, dengan kata lain variabel gangguan tidak random. Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi adalah antara lain: kesalahan dalam menentukan model, penggunaan log pada model, tidak memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya tidak minimum, sehingga tidak efisien (Catur Sugiyanto, 1994, hal. 78).

Autokorelasi adalah kasus khusus dari korelasi, kalau korelasi menunjukkan hubungan antara dua atau lebih variabel yang berbeda maka autokorelasi menunjukkan hubungan antara nilai-nilai yang berurutan dari variabel yang sama. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi ini dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson Statistik. Uji d-Durbin Watson dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat nilai-nilai taksiran faktor-faktor gangguan yang berurutan. Menghitung nilai d dengan rumus :

$$d\text{-hitung} = \frac{\sum(\epsilon_t - \epsilon_{t-1})^2}{\sum \epsilon_t^2}$$

Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel independen tertentu, diperoleh nilai kritis  $d_l$  dan  $d_u$  dalam tabel distribusi Durbin Watson untuk berbagai nilai  $\alpha$ . Nilai d-hitung yang dihasilkan dibandingkan dengan nilai d-tabel untuk membuktikan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model.

Hipotesis yang digunakan adalah :

$H_0$  = tidak ada autokorelasi (baik positif maupun negatif)

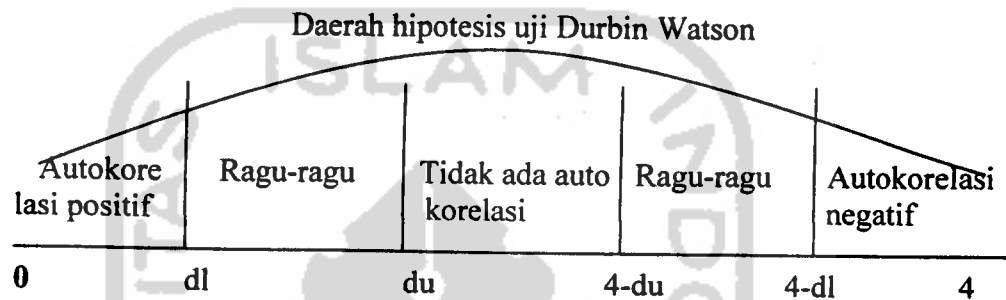
$d < d_l$  = tolak  $H_0$  (ada korelasi positif)

$d > 4-d_l$  = tolak  $H_0$  (ada korelasi negatif)

$d_u < d < 4-d_u$  = terima  $H_0$  (tak ada autokorelasi)

$d_l \leq d \leq d_u$  = pengujian tidak bisa disimpulkan  
(inconclusive)/ragu-ragu

$(4-d_u) \leq d \leq (4-d_l)$  = pengujian tidak bisa disimpulkan  
(inconclusive)/ragu-ragu.



Statistik  $d$  Durbin Watson mungkin tidak dapat digunakan untuk mendeteksi serial korelasi (derajat pertama) dalam model autoregresif, karena nilai  $d$  yang dihitung dalam model biasanya mendeteksi 2 yang merupakan nilai  $d$  yang diharapkan dalam suatu urutan yang benar-benar random.

#### 5.4.2.2.2. Pengujian Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah situasi tidak konstannya varians. Kasus ini terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varians yang sama untuk semua observasi. Akibat dari adanya heteroskedastisitas, penaksir OLS tetap tidak bias tetapi tidak efisien (Catur Sugiyanto, 1994, hal. 81).

Salah satu cara mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan uji White. Uji White dilakukan dengan cara meregresi residual kuadrat terhadap semua variabel bebas dan variabel bebas dikuadratkan.

Jika nilai  $R^2 \times$  Observasi kurang dari nilai Chi Square tabel maka regresi uji White tersebut adalah tidak signifikan sehingga model yang diuji tidak ada heteroskedistisitas.

#### 5.4.2.2.3. Pengujian Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari variabel independen lainnya.

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dapat dilihat dari nilai  $R^2$ , F hitung, serta t hitung. Kemungkinan adanya multikolinieritas jika nilai  $R^2$  dan F hitung sedangkan nilai t hitung banyak yang tidak signifikan. Cara lain yang digunakan untuk mendeteksi multikolinieritas adalah dengan metode Farrar-Glauber. Metode ini ditujukan untuk mendeteksi variabel-variabel manakah yang menyebabkan multikolinieritas. Prinsip teknik ini dengan membandingkan  $R^2$  model dengan  $R^2$  partial tiap variabel bebas yang diperoleh dari korelasi masing-masing variabel bebas dengan variabel bebas sisanya

## BAB VI

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pajak Daerah, Dinas Pendapatan Daerah dan Biro Pusat Statistik yang merupakan data *time series* atau runtut waktu sebanyak 21 tahun observasi, yaitu dari tahun 1983 – 2003. Data tersebut meliputi data Penerimaan Pajak Daerah, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Tingkat Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan Reformasi perpajakan sebagai variable dummy dengan nilai 0 sebelum Reformasi perpajakan dan nilai 1 setelah reformasi perpajakan.

Analisis data yang dilakukan terdiri analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif meliputi mean, standard deviasi, minimum, maximum untuk mendeskripsikan data variabel-variabel penelitian. Sedang analisis kuantitatif menggunakan regresi ganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Pengujian secara statistik digunakan untuk melihat tingkat hubungan atau pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang meliputi pengujian secara parsial variabel bebas dengan menggunakan uji t, uji serempak variabel bebas dengan menggunakan uji F, serta uji ketepatan model yaitu dengan koefisien determinasi. Hasil uji signifikansi regresi yang menggunakan uji t dan uji F sebelum disimpulkan model regresinya harus terbebas dari gangguan asumsi klasik autokorelasi, heteroskedastisitas dan multikolinieritas.

### 6.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yang digunakan terdiri Rata-rata(mean), Standard Deviasi, Minimum dan Maksimum terhadap data masing masing variabel penelitian.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini tampak dalam tabel berikut:

TABEL 6.1  
DATA VARIABEL PENELITIAN

obs	Y	X1	X2	X3	DM
1983	129825754	11.04	4.23	1569241	0
1984	124356422	10.26	6.19	1680354	0
1985	124902966	5.01	3.22	1717250	0
1986	130825000	5.15	5.46	1750143	0
1987	165950490	5.85	9.37	1759023	0
1988	200124573	6.61	7.38	1762458	0
1989	210055384	7.8	10.2	1793155	0
1990	331569507	8.57	9.15	1817499	0
1991	470674137	8.74	10.22	1847102	0
1992	520827110	8.83	8.49	1870573	0
1993	563886637	8.93	10.28	1872944	0
1994	768461673	8.97	10.56	1919340	0
1995	1049326157	9.27	9.54	1921003	0
1996	1058033746	9.4	7.75	1985690	0
1997	1295846841	6.11	11.7	1974381	0
1998	1068034506	-17.49	74.42	2034942	0
1999	1481392959	-0.29	1.77	1994094	0
2000	1718274184	4.33	10.79	2213104	0
2001	3056748123	3.64	11.52	2249160	1
2002	3703572683	3.99	9.08	2444055	1
2003	4401724704	4.39	5.78	2740679	1

Sumber: Jakarta Dalam Angka (BPS DKI JAKARTA :2003)

**Keterangan:**

Y = Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta ( Rupiah )

X1 = Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Persen)

X2 = Tingkat Inflasi (Persen)

X3 = Jumlah Wajib Pajak (Orang dan Lembaga)

DM = Variabel Dummy

0 = Sebelum Reformasi perpajakan

1 = Setelah Reformasi perpajakan

Statistik deskriptif masing-masing variabel selama periode pengamatan tampak dalam tabel berikut.

TABEL 6.2  
HASIL ANALISIS DESKRIPTIF

	Penerimaan pajak daerah Y	Pertumbuhan Ekonomi Daerah X1	Tingkat Inflasi X2	Jumlah Wajib Pajak X3
Mean	1.074.972.074.10	5.6719	11.29	1.948.390.
Median	563.886.637.00	6.6100	9.15	1.872.944.
Maximum	4.401.724.704.00	11.040	74.42	2.740.679.
Minimum	124.356.422.00	-17.490	1.77	1.569.241.
Std. Dev.	1.225.640.392.00	5.9780	14.72	2.728.71.

Sumber: Hasil Perhitungan Eviews (Lampiran Hal. 5)

Tabel diatas menunjukkan rata-rata Penerimaan Pajak Daerah periode pengamatan 1983 sampai dengan 2003 adalah Rp 1,0749 Triliun rupiah, rata-rata Pertumbuhan Ekonomi Daerah 5.6719, rata-rata tingkat Tingkat Inflasi 11,29% dan rata-rata Jumlah Wajib Pajak 1.948.390

## 6.2 Analisis Kuantitatif

Analisis ini digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini yaitu diduga ada pengaruh Reformasi perpajakan terhadap Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta dengan variabel kontrol Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Tingkat Inflasi dan Jumlah Wajib Pajak .



Proses analisis yang dilakukan dengan bantuan komputer dengan menggunakan program *eviews* metode OLS (*Ordinary Least Square*), akan menghasilkan parameter (koefisien regresi) dari masing-masing variabel independen, dimana parameter tersebut menunjukkan besarnya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen.

### 6.2.1 Penentuan Bentuk Fungsi Model Empiris dengan MWD

Pemilihan bentuk fungsi model empirik merupakan masalah yang sangat penting karena teori ekonomi tidak secara spesifik menunjukkan ataupun mengatakan apakah sebaiknya bentuk fungsi suatu model empirik dinyatakan dalam bentuk linier ataukah log-linier atau bentuk fungsi yang lainnya (Gujarati, 1992: 223).

Pada penelitian ini akan diuji 2 model menggunakan uji Mackinnon, White dan Davidson (MWD test) dengan persamaan sebagai berikut:

Model pertama persamaan dalam bentuk linier

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_4D_t + u$$

Model kedua persamaan dalam bentuk log-linier

$$\ln Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3\ln X_3 + b_4D_t + v$$

Pada model kedua karena variabel Pertumbuhan Ekonomi ( $X_1$ ) dan variabel Tingkat Inflasi ( $X_2$ ) bisa bernilai negatif maka tidak ikut dilogkan. Langkah uji MWD sebagai berikut (Program Magister Sains UGM, 2001: 27):

- a. Estimasi Model I dan II, kemudian menentukan  $F_1$  dan  $F_2$  sebagai nilai *fitted value*. (sebagaimana tertera dalam lampiran hal 1 dan 2)
- b. Menentukan nilai  $Z_1$  sebagai  $\log F_1$  dikurangi  $F_2$  dan  $Z_2$  sebagai antilog  $F_2$  dikurangi  $F_1$  (sebagaimana tertera dalam lampiran hal. 3)

c. Estimasi persamaan berikut

$$\text{Model I.} \quad : Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_4D_t + a_5Z_1 + v$$

$$\text{Model II} \quad : \text{Ln}Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3\text{Ln}X_3 + b_4D_t + b_5Z_2 + v$$

d. Dari langkah c diatas bila  $Z_1$  signifikan secara statistik maka  $H_0$  yang menyatakan bahwa model yang benar adalah bentuk linier ditolak dan sebaliknya, bila  $Z_2$  signifikan maka  $H_a$  yang menyatakan bahwa model yang benar adalah log linier ditolak

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan program eviews (lampiran hal 4) tampak koefisien  $Z_1$  dan  $Z_2$  tidak signifikan pada taraf 5% uji 2 sisi yaitu t hitung  $Z_1 = 1,80$  dengan prob 0,0923 dan t hitung  $Z_2 = -0,26$  dengan prob 0,7974 sehingga kedua model tersebut sama-sama bisa dipakai. Tetapi  $Z_1$  signifikan pada taraf 5% uji 1 sisi atau signifikan pada taraf 10% sehingga model kedua (log-linier) dapat dikatakan lebih baik dari model pertama..

### 6.2.2 Hasil Analisis Regresi Awal

Analisis regresi ini untuk mengestimasi model kedua yaitu data dalam bentuk log-linier:

$$\text{Ln}Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3\text{Ln}X_3 + \beta_4D_m + v$$

**TABEL 6.3**  
**HASIL REGRESI AWAL**

Dependent Variable: LNY  
Method: Least Squares  
Date: 01/23/06 Time: 22:04  
Sample: 1983 2003  
Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-120.6548	20.48748	-5.889198	0.0000
X1	0.023763	0.036654	0.648312	0.5260
X2	0.009755	0.014388	0.678012	0.5075
LN <sub>X3</sub>	9.719246	1.414918	6.869125	0.0000
DM	-0.563935	0.496674	-1.135423	0.2729
R-squared	0.870726	Mean dependent var		20.18616
Adjusted R-squared	0.838408	S.D. dependent var		1.171785
S.E. of regression	0.471041	Akaike info criterion		1.536513
Sum squared resid	3.550072	Schwarz criterion		1.785209
Log likelihood	-11.13339	F-statistic		26.94204
Durbin-Watson stat	1.494297	Prob(F-statistic)		0.000001

Sumber: Perhitungan Program Eviews (lampiran hal 6)

Hasil regresi awal diatas belum bisa disimpulkan signifikansi hasilnya menggunakan uji T maupun uji F sebelum diketahui apakah ada gangguan asumsi klasik atau tidak.

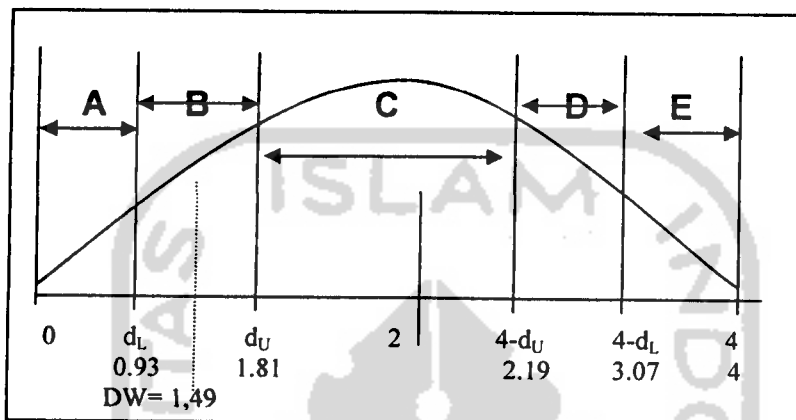
### 6.2.3 Uji Asumsi Klasik terhadap Regresi Awal

#### 6.2.3.1 Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian pengamatan yang diurutkan menurut waktu (time series) atau ruang (cross section). Dalam suatu regresi linier, apabila faktor pengganggu (residu) pada suatu pengamatan dipengaruhi oleh faktor pengganggu (residu) pada pengamatan yang lain maka dalam regresi tersebut terkena autokorelasi. Jika suatu regresi terjadi autokorelasi maka hasil uji T dan uji F maupun R square tidak bisa dipercaya lagi.

Uji autokorelasi pada regresi ini menggunakan teknik Durbin-Watson. Nilai statistik Durbin Watson pada regresi awal (tabel 6.3) diperoleh  $DW = 1,49$ . Dengan jumlah observasi 21, pada  $K' = 4$ ;  $\alpha=5\%$  diperoleh nilai  $d_L = 0,93$  dan  $d_U = 1,81$ . Nilai DW ini kemudian diplotkan ke kurva seperti pada Gambar 6.1.

GAMBAR 6.1  
KURVA UJI AUTOKORELASI



Keterangan :

- A : Autokorelasi positif
- B : Daerah tanpa keputusan/ragu-ragu
- C : Tidak terjadi autokorelasi
- D : Daerah tanpa keputusan/ragu-ragu
- E : Terjadi autokorelasi negatif

Dari gambar 6.1 tampak nilai DW berada diantara  $d_L$  dan  $d_U$  atau berada di daerah B yaitu daerah tanpa keputusan sehingga dapat disimpulkan pada regresi awal ini **masih ragu ragu dalam menentukan keputusan.**

Oleh karena itu regresi awal harus diperbaiki dulu agar kesimpulan yang dihasilkan nantinya tidak bias.

### 6.3 Hasil Regresi Perbaikan

Untuk memperbaiki regresi dari gangguan autokorelasi ada beberapa cara misalnya dengan mentransformasi data kedalam bentuk *first difference* atau dengan menggunakan metode kuadrat terkecil tertimbang/*Weighted Least Square* (Program Magister Sains UGM, 2001:24)

Perbaikan menggunakan metode kuadrat terkecil tertimbang (*Weighted Least Square*) hasilnya tampak dalam tabel berikut.

TABEL 6.4

## HASIL REGRESI PERBAIKAN

Dependent Variable: LNY

Method: Least Squares

Date: 01/23/06 Time: 22:57

Sample: 1983 2003

Included observations: 21

Weighting series: X1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-126.2123	13.89502	-9.083274	0.0000
X1	0.135410	0.044688	3.030134	0.0080
X2	0.052194	0.017846	2.924719	0.0099
LNX3	10.01559	0.963750	10.39230	0.0000
DM	-0.277769	0.499527	-0.556065	0.5859
<b>Weighted Statistics</b>				
R-squared	0.999713	Mean dependent var	19.81667	
Adjusted R-squared	0.999641	S.D. dependent var	21.39432	
S.E. of regression	0.405244	Akaike info criterion	1.235603	
Sum squared resid	2.627566	Schwarz criterion	1.484299	
Log likelihood	-7.973832	F-statistic	13931.84	
Durbin-Watson stat	1.998587	Prob(F-statistic)	0.000000	
<b>Unweighted Statistics</b>				
R-squared	0.780822	Mean dependent var	20.18616	
Adjusted R-squared	0.726028	S.D. dependent var	1.171785	
S.E. of regression	0.613340	Sum squared resid	6.018977	
Durbin-Watson stat	1.933102			

Sumber: Perhitungan Program Eviews (lampiran hal 8)

Metode analisis data menggunakan model log linier:

$$\text{Ln}Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3\text{Ln}X_3 + \beta_4\text{DM} + v$$

Keterangan:

- Y : Penerimaan Pajak Daerah (Rupiah)  
 X<sub>1</sub> : Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Persen)  
 X<sub>2</sub> : Tingkat Inflasi (Persen)  
 X<sub>3</sub> : Jumlah Wajib Pajak (Orang dan Lembaga)  
 DM : Variabel Dummy Reformasi perpajakan  
 v : Variabel gangguan

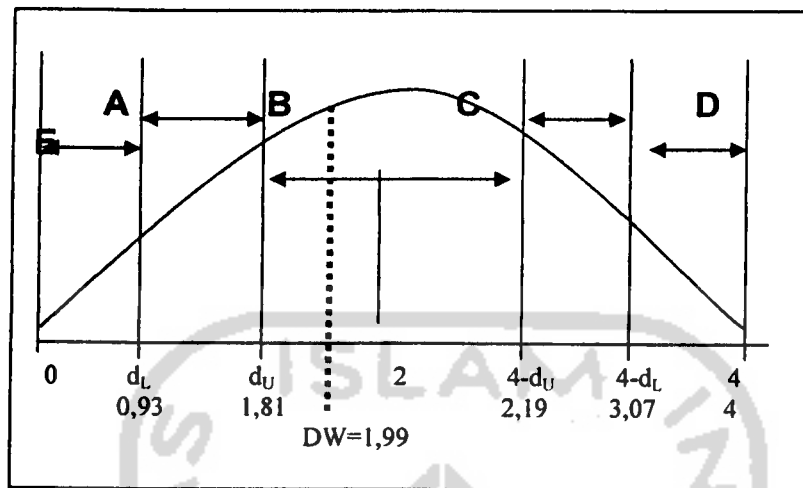
#### 6.4 Hasil Uji Asumsi Klasik Terhadap Regresi Perbaikan.

Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji autokorelasi dan uji heteroskedastisitas dan uji multikolinieritas.

##### 6.4.1 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dengan menggunakan teknik Durbin-Watson diperoleh nilai statistik Durbin Watson (tabel 6.5) DW = 1,99. Dengan jumlah observasi 21, pada K' = 4; α=5% diperoleh nilai dL= 0,93 dan dU=1,81. Nilai DW ini kemudian diplotkan ke kurva sebagai berikut.

GAMBAR 6.2  
KURVA UJI AUTOKORELASI



Dari gambar diatas tampak nilai DW 1,99 berada diantara  $d_U$  dan  $4-d_U$  atau berada di daerah C yaitu daerah tidak terjadi autokorelasi sehingga dapat disimpulkan pada regresi perbaikan ini **tidak terkena gangguan autokorelasi.**

#### 6.4.2. Uji Heteroskedastisitas

Salah satu syarat regresi linier adalah varians dari faktor pengganggu(residu) adalah sama untuk semua observasi atau pengamatan atas variabel bebas X atau sering disebut homoskedastisitas. Tetapi jika varians variabel tak bebas Y meningkat sebagai akibat meningkatnya varians variabel bebas X maka varians dari Y disebut tidak sama atau regresi tersebut terkena gangguan heteroskedastisitas. Untuk medeteksi adanya gangguan heteroskedastisitas banyak cara antara lain dengan teknik Park, Glejser dan White.

Pada penelitian ini digunakan teknik White yang prinsipnya adalah meregresikan variabel bebas, variabel bebas dikuadratkan terhadap residu dari regresi

awal. Jika hasil regresi uji White ini signifikan (bermakna) maka regresi awal yang diuji tidak terkena gangguan Heteroskedastisitas. Dengan bantuan komputer program Eviews diperoleh hasil uji White seperti tampak berikut

TABEL 6.5  
HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS REGRESI AWAL

White Heteroskedasticity Test:				
F-statistic	3.107722	Probability	0.037694	
Obs*R-squared	11.99439	Probability	0.062094	
Test Equation:				
Dependent Variable: RESID^2				
Method: Least Squares				
Date: 01/24/06 Time: 12:15				
Sample: 1983 2003				
Included observations: 21				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.591865	7.579089	-0.210034	0.8367
X1	-0.075026	0.062860	-1.193535	0.2525
X1^2	0.003716	0.004727	0.786063	0.4449
X2	-0.008617	0.027884	-0.309040	0.7618
X2^2	-0.000430	0.000788	-0.545907	0.5937
LNX3	0.149384	0.524389	0.284872	0.7799
DM	0.134761	0.165745	0.813065	0.4298
R-squared	0.571162	Mean dependent var	0.169051	
Adjusted R-squared	0.387374	S.D. dependent var	0.197465	
S.E. of regression	0.154557	Akaike info criterion	-0.635306	
Sum squared resid	0.334430	Schwarz criterion	-0.287131	
Log likelihood	13.67071	F-statistic	3.107722	
Durbin-Watson stat	3.021632	Prob(F-statistic)	0.037694	

Sumber: Perhitungan Program Eviews (lampiran hal 7)

Karena nilai Observasi x R Square = 11,99 kurang dari nilai Chi Square ( $\chi^2$ ) tabel pada derajat kebebasan (DF) = 6;  $\alpha = 5\%$  yaitu 12,59 maka regresi uji white tersebut adalah tidak signifikan (tidak bermakna) sehingga model regresi yang diuji terbebas dari gangguan heteroskedastisitas.

#### 6.4.3 Uji Multikolinieritas

Asumsi regresi linier klasik lainnya adalah tidak adanya multikolinieritas sempurna (tidak adanya hubungan linier sempurna) antar variabel bebas. Untuk



mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas bisa digunakan regresi/korelasi parsial (teknik Farrar & Glauber). Prinsip dari teknik ini membandingkan nilai R square model yang diuji yang diperoleh dari regresi perbaikan (disebut  $R^2_m$ ) dengan R square partial (disebut  $R^2_{x1}$ ,  $R^2_{x2}$ ,  $R^2_{x3}$ ,  $R^2_{dm}$ ). Jika  $R^2_m$  (model) lebih dari  $R^2$  partial maka pada regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas.

Persamaan regresi induk atau model yang diuji

$$\text{Ln}Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \text{Ln}X_3 + \beta_4 D_m + v \rightarrow \text{Diperoleh } R^2_m \text{ (} R^2 \text{ model)}$$

Persamaan regresi parsial

$$X_1 = \beta_0 + \beta_1 X_2 + \beta_2 \text{Ln}X_3 + \beta_3 D_m + e \rightarrow \text{Diperoleh } R^2_{x1} \text{ (} R^2 \text{ parsial } X_1)$$

$$X_2 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 \text{Ln}X_3 + \beta_3 D_m + e \rightarrow \text{Diperoleh } R^2_{x2} \text{ (} R^2 \text{ parsial } X_2)$$

$$\text{Ln}X_3 = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 D_m + e \rightarrow \text{Diperoleh } R^2_{x3} \text{ (} R^2 \text{ parsial } \text{Ln}X_3)$$

$$D_m = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \text{Ln}X_3 + e \rightarrow \text{Diperoleh } R^2_{Dm} \text{ (} R^2 \text{ parsial } D_m)$$

Hasil rangkuman uji multikolinieritas pada penelitian ini tampak pada tabel berikut:

TABEL 6.6  
RINGKASAN HASIL UJI MULTIKOLINIERITAS.

No	Uji Multikolinieritas	$R^2$ Parsial	$R^2_m$ Induk	Keterangan	Kesimpulan
1	$R^2_{x1} - X_1$	0,76	0,999	$R^2_{x1} < R^2_m$	Tdk terjadi Multikolinieritas
2	$R^2_{x2} - X_2$	0,75		$R^2_{x2} < R^2_m$	Tdk terjadi Multikolinieritas
3	$R^2_{x3} - \text{Ln}X_3$	0,67		$R^2_{x3} < R^2_m$	Tdk terjadi Multikolinieritas
4	$R^2_{Dm} - \text{Dummy}$	0,65		$R^2_{dm} < R^2_m$	Tdk terjadi Multikolinieritas

Sumber: Perhitungan Program Eviews (lampiran hal 12-13)

Dari tabel diatas tampak hasil uji multikolinieritas semua korelasi/regresi parsial besarnya  $R^2_x$  lebih kecil dari nilai  $R^2_m$  model yang diuji sehingga dapat disimpulkan pada regresi ini tidak terdapat gangguan multikolinieritas.

### 6.5. Uji F Statistik

Uji F digunakan untuk menguji hipotesis apakah secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen **Penerimaan Pajak Daerah**. Dari hasil perhitungan komputer program Eviews dapat disusun tabel uji F seperti berikut.

TABEL 6.7  
HASIL UJI F (UJI KOEFISIEN REGRESI SECARA SERENTAK)

<b>F Stat (hitung)</b>	<b>DF</b>	<b>F tabel <math>\alpha</math> 5%</b>	<b>Proabilitas</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Kesimpulan</b>
13931,84	k-1= 4; n-k= 17	2,96	0.00000	F stat > F tabel	F signifikan

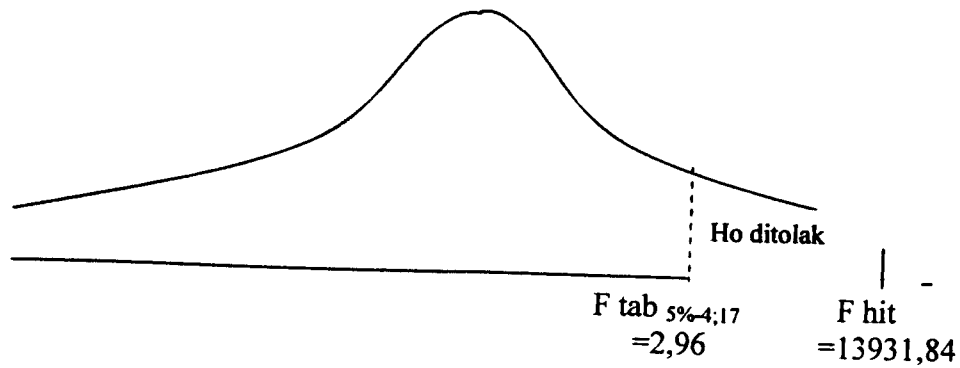
Sumber: Perhitungan Program Eviews (lampiran hal 8)

Hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut

Ho:  $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ , artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

Ha:  $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$ , artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

GAMBAR 6.3  
KURVA UJI KOEFISIEN SECARASERENTAK (UJI F)



Pada Gambar diatas tampak nilai F hitung = 13931,84 berada pada daerah penolakan  $H_0$  yaitu lebih dari F tabel pada derajat kebebasan pembilang  $k-1$  ( $4-1$ ) = 3 lawan penyebut  $n-k$  ( $21-4$ )=17 yaitu 2,96 maka  $H_0$  ditolak atau hasil uji F signifikan. Atau karena Probabilitas  $F = 0,00000$  lebih kecil dari 0,05 atau kurang dari 5% maka uji F signifikan. Artinya dapat dikatakan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen **Penerimaan Pajak Daerah**

#### 6.6. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R square atau  $R^2$ ) menunjukkan ketepatan prediksi atau proporsi variabel tak bebas yang mampu dijelaskan oleh variabel bebas secara bersama-sama. Dari hasil regresi perbaikan diperoleh nilai koefisien determinasi (R square) = 0,999. Ini artinya 99,9% perubahan **Penerimaan Pajak Daerah** dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh Variabel **Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Tingkat Tingkat Inflasi, Jumlah Wajib Pajak dan variable Dummy** secara bersama-sama. Sedang yang 0,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

## 6.7 Pengujian secara parsial (uji-t) terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Uji t digunakan untuk menguji apakah secara individu variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen Penerimaan Pajak Daerah.

### 6.7.1. Pengujian terhadap $\beta_1$ (Pertumbuhan Ekonomi Daerah)

Hipotesa:

$H_0 : \beta_1 = 0 \rightarrow$  Pertumbuhan Ekonomi Daerah tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah

$H_a : \beta_1 > 0 \rightarrow$  Pertumbuhan Ekonomi Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Kriteria:

$H_0$  akan diterima dan  $H_a$  akan ditolak jika  $t_{hitung} \leq t_{tabel}$

$H_a$  akan ditolak dan  $H_0$  akan diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$

*Uji – satu sisi*

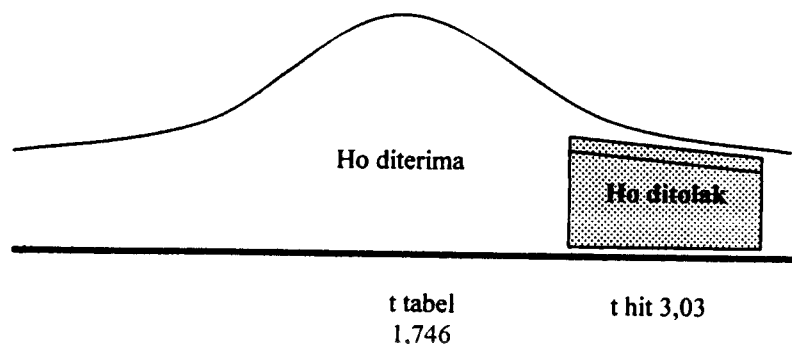
**T hitung variabel  $X_1 = 3,03$**

Tingkat signifikan ( $\alpha$ ) = 5 %

$t_{tabel}$  pada  $\alpha$  5% ;  $df = n - k = 21 - 5 = 16 \rightarrow t_{tabel} : 1,746$

Nilai tersebut jika diplotkan ke kurva uji t tampak sebagai berikut:

GAMBAR 6.4  
KURVA UJI t VARIABEL PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH



Karena nilai  $t_{hitung}$  (3,03) berada di daerah penolakan  $H_0$  maka  $H_0$  ditolak,  $H_a$  diterima atau karena Probabilitas  $0,0080 < 0,05$  maka  $t$  hitung variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah ( $X_1$ ) adalah signifikan sehingga hipotesis yang menyatakan diduga Pertumbuhan Ekonomi Daerah ( $X_1$ ) mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah terbukti.

#### 6.7.2 Pengujian terhadap $\beta_2$ (Tingkat Tingkat Inflasi)

Hipotesa:

$H_0 : \beta_2 = 0 \rightarrow$  Tingkat Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah

$H_a : \beta_2 < 0 \rightarrow$  Tingkat Inflasi berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Daerah

Kriteria:

$H_0$  akan diterima dan  $H_a$  akan ditolak jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$

$H_a$  akan ditolak dan  $H_0$  akan diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$

*Uji – satu sisi*

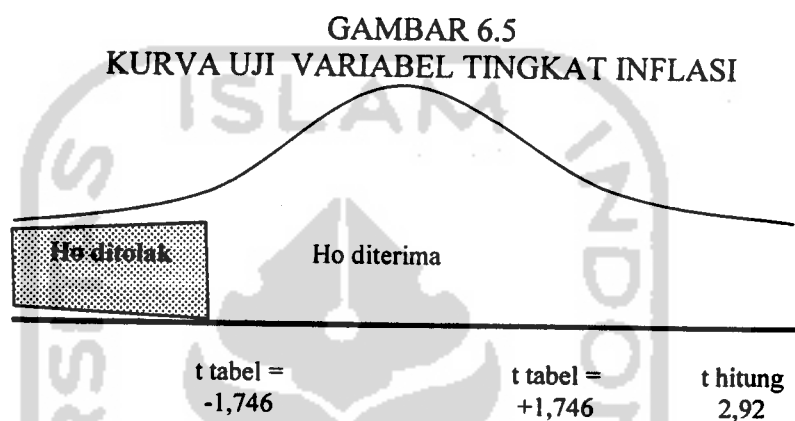
**Nilai t Hitung variabel X2 = 2,92**

Tingkat signifikan ( $\alpha$ ) = 5 %

$t_{\text{tabel}}$  pada  $\alpha$  5% ;  $df = n-k = 21 - 5 = 16$

$t_{\text{tabel}}$  : 1,746

Nilai tersebut jika diplotkan ke kurva uji t tampak sebagai berikut



Karena nilai  $t_{\text{hitung}}$  (2,92) berada pada daerah penerimaan  $H_0$  dan nilainya  $>$   $t_{\text{tabel}}$  (1,746) maka  $H_0$  diterima, sehingga variabel Tingkat Inflasi tidak berpengaruh negatif tetapi sebaliknya berpengaruh positif signifikan sehingga hipotesis yang menyatakan diduga variabel Tingkat Inflasi mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah tidak terbukti

### 6.7.3. Pengujian terhadap $\beta_3$ (Jumlah Wajib Pajak)

Hipotesa:

$H_0 : \beta_1 = 0 \rightarrow$  Jumlah Wajib Pajak tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak

Daerah

$H_a : \beta_1 > 0 \rightarrow$  Jumlah Wajib Pajak mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah

Kriteria:

$H_0$  akan diterima dan  $H_a$  akan ditolak jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$

$H_0$  akan ditolak dan  $H_a$  akan diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$

Uji – satu sisi

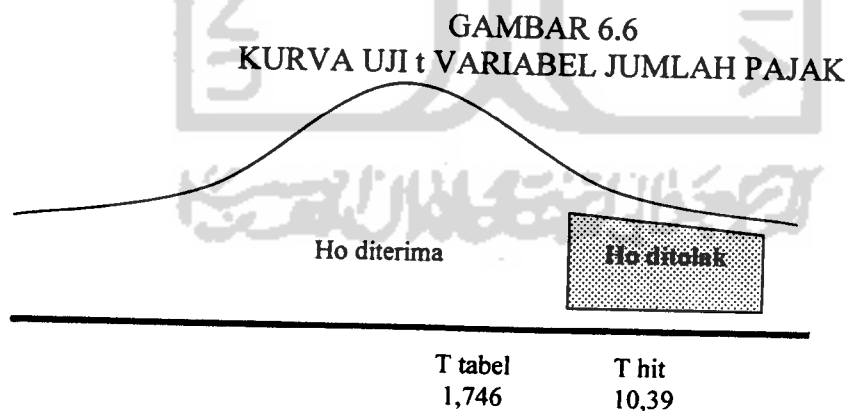
Nilai  $t$  hitung var  $\ln X_3 = 10,39$

Tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5 %

$t_{tabel}$  pada  $\alpha$  5% ;  $df = n - k = 21 - 5 = 16$

$t_{tabel} : 1,746$

Nilai tersebut jika diplotkan ke kurva uji  $t$  tampak sebagai berikut



Karena nilai  $t_{hitung}$  (10,39) berada di daerah penolakan  $H_0$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima maka  $t$  hitung variabel Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan sehingga hipotesis yang menyatakan diduga

Jumlah Wajib Pajak mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah terbukti.

#### 6.7.4. Pengujian terhadap $\beta_4$ (Dummy Reformasi perpajakan)

Hipotesa:

$H_0 : \beta_1 = 0 \rightarrow$  Reformasi perpajakan tidak mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah

$H_a : \beta_1 > 0 \rightarrow$  Reformasi perpajakan mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah.

Kriteria:

$H_0$  akan diterima dan  $H_a$  akan ditolak jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$

$H_0$  akan ditolak dan  $H_a$  akan diterima jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$

*Uji – satu sisi*

Nilai  $t$  hitung var dummy = -0,556

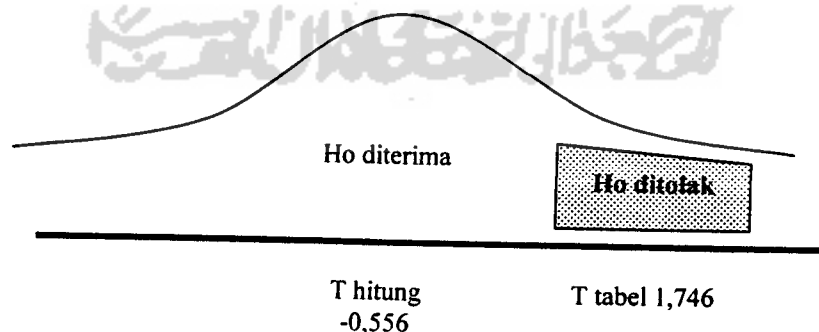
Tingkat signifikan ( $\alpha$ ) = 5 %

$t_{tabel}$  pada  $\alpha$  5%;  $df = n - k = 21 - 5 = 16$

$t_{tabel} : 1,746$

Nilai tersebut jika diplotkan ke kurva uji  $t$  tampak sebagai berikut

GAMBAR 6.7  
KURVA UJI  $t$  VARIABEL DUMMY



Karena nilai  $t_{hitung}$  (-0.556) berada di daerah penerimaan  $H_0$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak maka  $t$  hitung variabel Dummy reformasi perpajakan



tidak berpengaruh signifikan sehingga hipotesis yang menyatakan diduga Reformasi mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah tidak terbukti.

### 6.8 Interpretasi Masing-masing Variabel Independen

Setelah pengujian hipotesa dengan menggunakan uji t dan uji f maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut

$$\text{LnY} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 \text{Ln}X_3 + \beta_4 D_t + v$$

$$\text{LnY} = -126.21 + 0.135X_1 + 0.052X_2 + 10.01\text{Ln}X_3 - 0.277D_m + v$$

Koefisien dari masing-masing variabel tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut

- a. Nilai Konstanta = -126.21 Tanda parameter untuk konstanta adalah negatif yang berarti jika tanpa variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Tingkat Inflasi dan Jumlah Wajib Pajak maka Penerimaan Pajak Daerah akan turun sebesar 126.21 persen.
- b. Koefisien  $X_1 = 0.135$ . Tanda parameter untuk variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah adalah positif yang berarti jika Pertumbuhan Ekonomi Daerah naik satu tingkat maka Penerimaan Pajak Daerah akan naik 0.135 persen dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus).
- c. Koefisien  $X_2 = 0.052$ . Tanda parameter untuk Tingkat Inflasi adalah positif yang berarti jika Tingkat Inflasi naik satu persen maka Penerimaan Pajak Daerah akan meningkat 0.052 persen dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus)

- d. Koefisien  $\ln X_3 = 10.01$ . Tanda parameter untuk Jumlah Wajib Pajak adalah positif yang berarti jika Jumlah Wajib Pajak naik 1 persen maka Penerimaan Pajak Daerah juga akan naik sebesar 10.01 persen
- e. Koefisien Dummy = -0,277. Tanda parameter untuk variabel dummy reformasi adalah negatif tetapi tidak signifikan. Karena tidak signifikan koefisiennya tidak perlu diinterpretasikan sehingga variabel reformasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Daerah

### 6.9. Pembahasan

Penelitian untuk mengetahui apakah reformasi perpajakan mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta dengan variabel kontrol Pertumbuhan ekonomi, Inflasi dan Jumlah Wajib Pajak. Penelitian ini menggunakan model regresi log linier karena berdasarkan hasil uji spesifikasi model menggunakan MWD test bentuk log-linier merupakan model yang lebih baik dari bentuk linier.

Hasil analisis menunjukkan persamaan regresi terbebas dari gangguan asumsi klasik heteroskedastisitas, autokorelasi dan multikolinieritas sehingga kesimpulan hasil regresi bisa diandalkan. Dari analisis ini tampak variabel variabel Dummy reformasi perpajakan tidak signifikan sehingga hipotesis yang menyatakan variabel dummy reformasi perpajakan berpengaruh positif signifikan ditolak sehingga dapat disimpulkan penerimaan pajak daerah tidak dipengaruhi oleh faktor reformasi perpajakan tetapi dipengaruhi oleh variabel lain yang menjadi variabel kontrol. Sedangkan hasil analisis terhadap variabel kontrol ini

Pajak ( $\ln X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori dan mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Enda Wijaya(2003). Sedang variabel Tingkat Inflasi ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan positif tidak sesuai dengan hipotesa maupun teori yang menyatakan Tingkat Inflasi berpengaruh negatif. Hal ini terjadi karena pada penelitian ini dalam periode pengamatan tingkat inflasi yang terjadi belum mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak hal tersebut didukung fakta bahwa sekitar 80% penerimaan pajak daerah di peroleh dari pajak kendaraan bermotor, sedangkan kendaraan bermotor tersebut merupakan hal pokok dalam transportasi di ibu kota Jakarta.



## BAB VII

### SIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### 7.1 . Kesimpulan

Dari hasil analisa data untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi Daerah (X1) secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y) sesuai dengan hipotesis dengan Nilai T hitung adalah 3,03 yaitu lebih dari T tabel 1,746 sehingga dapat diasumsikan semakin besar Pertumbuhan Ekonomi Daerah semakin besar pula Penerimaan Pajak Daerahnya.
2. Tingkat Inflasi (X2) secara individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y) dengan Nilai T hitung adalah 2,92 yaitu lebih dari T tabel 1,746. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis yang menyatakan tingkat inflasi berpengaruh negatif terhadap Penerimaan Pajak Daerah (Y). Ketidak sesuaian dengan hipotesis ini kemungkinan disebabkan karena tingkat inflasi yang terjadi belum mempengaruhi wajib pajak dalam melakukan kewajibannya membayar pajak hal tersebut didukung fakta bahwa sekitar 80% penerimaan pajak daerah di peroleh dari pajak kendaraan

bermotor, sedangkan kendaraan bermotor tersebut merupakan hal pokok dalam transportasi di ibu kota Jakarta.

3. Jumlah Wajib Pajak(X3) secara individu berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak daerah (Y) dengan nilai T hitung variabel Jumlah Wajib Pajak(X3) adalah 10,39 lebih dari T tabel 1,746, sehingga hipotesis yang menyatakan Jumlah Wajib Pajak(X3) berpengaruh positif dan signifikan dapat diterima.
4. Variabel dummy reformasi perpajakan (Dm) secara individu berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah (Y) dengan nilai t hitung variable dummy -0,556 kurang dari t tabel 1,746, sehingga hipotesis yang menyatakan variable dummy reformasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan tidak dapat diterima.
5. Secara bersama-sama variabel bebas yang diteliti yaitu Pertumbuhan Ekonomi Daerah(X1), Tingkat Inflasi(X2), Jumlah Wajib Pajak(X3), berpengaruh secara bermakna (signifikan) terhadap variabel tak bebas Penerimaan Pajak Daerah (Y).
6. ( $R^2$ ) sebesar 0,9997 yang menunjukkan bahwa secara statistik variasi perubahan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta dipengaruhi oleh variabel Pertumbuhan ekonomi, Tingkat Inflasi, Jumlah Wajib Pajak, dan variable dummy reformasi perpajakan dengan kata lain 99,97% dari Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta dipengaruhi oleh variabel-variabel yang digunakan

dalam metode ini, dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar model ini.

6. Pengujian pelanggaran terhadap asumsi klasik yang dilakukan tidak ditemukan adanya autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinieritas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi klasik.

## 7.2. Implikasi/Saran

Sesuai kesimpulan yang dipaparkan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi Daerah(X1) berpengaruh positif dan signifikan yang berarti semakin tinggi Pertumbuhan Ekonomi Daerah semakin tinggi pula tingkat Penerimaan Pajak Daerahnya. Dengan demikian Penerimaan Pajak Daerah dapat diprediksi dari Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Apabila pemerintah daerah ingin meningkatkan penerimaan pajak daerah maka pemerintah perlu melakukan kebijakan dan rangsangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerahnya
2. Variabel Tingkat Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah tidak sesuai dengan hipotesis. Dengan demikian variabel tingkat inflasi tidak bisa dipergunakan untuk memprediksi jumlah penerimaan pajak daerah.

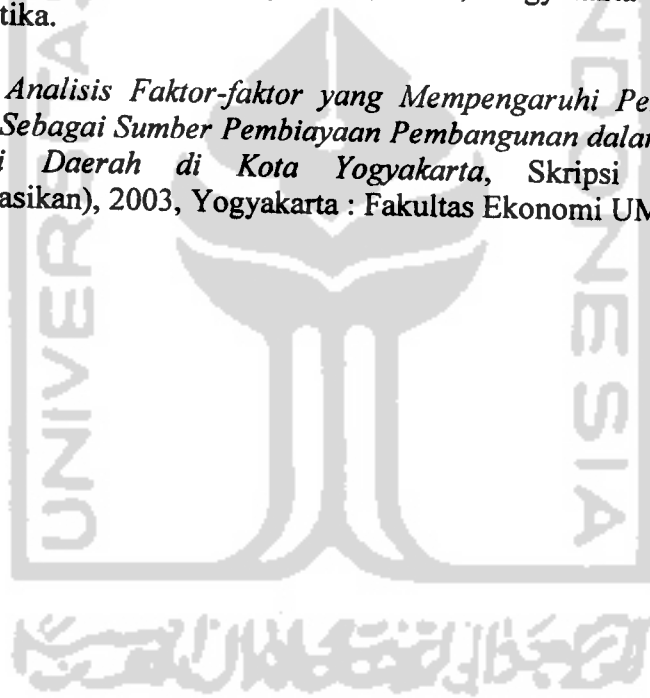
3. Variabel Jumlah Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Penerimaan Pajak Daerah yang berarti semakin banyak jumlah wajib pajak semakin besar pula penerimaan pajak daerahnya. Dengan demikian untuk meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pemerintah bisa lebih melakukan ekstensifikasi jumlah wajib pajak dengan cara lebih mentertibkan pendataan terhadap perorangan maupun badan yang menjadi wajib pajak.
4. Variabel dummy reformasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Tidak sesuai dengan hipotesis sehingga variable dummy reformasi perpajakan tidak dapat berpengaruh terhadap kenaikan dan penurunan penerimaan pajak daerah propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian pemerintah daerah mengetahui bahwa dengan adanya perubahan di perpajakan daerah penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh adanya perubahan tersebut. Karena perubahan penerimaan pajak daerah DKI Jakarta tergantung dari sifat masyarakatnya yang hidup di lingkungan kota besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhari A. , Samudra, *Perpajakan di Indonesia*, 1995, Jakarta : Erlangga.
- Bratakusuma, Dedy Supriady, dan Dadang Solikhin M, *Otonomi Penyelenggaraan Pemda*, 2001, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Umum.
- Bambang Prakoso, Kesit, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Cetakan Pertama, 2003, Yogyakarta : UII Press.
- Bagaskoro, Kukilo, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi pendapatan asli Daerah Pemerintah DKI Jakarta*, Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan), 2004, Yogyakarta : FE UII.
- BPS (Badan Pusat Statistik), 2003, *Jakarta dalam Angka*, berbagai edisi.
- Elmi, Bakhrul, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*, 2002, Jakarta : UI Press.
- Gujarati, Damodar, *Ekonometrika Dasar*, 1991, Jakarta : Erlangga.
- Harun, Hamrolie, *Penuntun Analisis Peningkatan Dana Pembangunan Kota*, 1990, Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Iswardono, *Usaha Peningkatan PAD Daerah Kotamadya Yogya*, 1992, Yogyakarta : BPF.
- Kaho, Josef Riwu, *Prospek Otonomi Daerah di Negara RI*, 1997, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro, Mudrajad, *Otonomi dan Pembangunan Daerah*, 2004, Jakarta : Erlangga.
- Munawir, H. S, *Perpajakan*, 1997, Yogyakarta : Liberty.
- Muqodim, *Perpajakan*, Buku 1, 1999, Yogyakarta : UII Press Ekonisia.
- M. Suparmoko , *Ekonomi Publik*, Edisi pertama, 2001, Yogyakarta : Andi.
- Na'iem, M Numan, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Di Propinsi D.I Yogyakarta*, Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan), 1996, Yogyakarta : FE UII.
- Program magister sains UGM , *Modul pelatihan ekonometrika*, Program magister sains UGM, 2001.



- Saragih, Panglima, *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi*, 2003, Jakarta : PT Ghalia Indonesia
- Soeratno (Editor), *Ekonomi Makro Pengantar*, Edisi 1, 2000, Yogyakarta : STIE YKPN.
- Sugianto, Catur, *Ekonometrika Terapan*, 1994, Yogyakarta : BPFEE.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, Edisi kedua, 2002, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sulthan, Salma, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pajak Pembangunan I dalam Mendukung Penerimaan PAD di Semarang*, Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan), 1997, Yogyakarta : FE UII.
- Suwardi, Eko, *Perpajakan*, Edisi pertama, 1999, Yogyakarta : Widya Sarana Informatika.
- Wijaya, Enda, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan dalam Melaksanakan Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta*, Skripsi Sarjana (tidak dipublikasikan), 2003, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UMY.



# *Lampiran*



**DATA SEBELUM DILOGKAN**

obs	Y	X1	X2	X3	DM
1983	129825754	11.04	4.23	1569241	0
1984	124356422	10.26	6.19	1680354	0
1985	124902966	5.01	3.22	1717250	0
1986	130825000	5.15	5.46	1750143	0
1987	165950490	5.85	9.37	1759023	0
1988	200124573	6.61	7.38	1762458	0
1989	210055384	7.8	10.2	1793155	0
1990	331569507	8.57	9.15	1817499	0
1991	470674137	8.74	10.22	1847102	0
1992	520827110	8.83	8.49	1870573	0
1993	563886637	8.93	10.28	1872944	0
1994	768461673	8.97	10.56	1919340	0
1995	1049326157	9.27	9.54	1921003	0
1996	1058033746	9.4	7.75	1985690	0
1997	1295846841	6.11	11.7	1974381	0
1998	1068034506	-17.49	74.42	2034942	0
1999	1481392959	-0.29	1.77	1994094	0
2000	1718274184	4.33	10.79	2213104	0
2001	3056748123	3.64	11.52	2249160	1
2002	3703572683	3.99	9.08	2444055	1
2003	4401724704	4.39	5.78	2740679	1

**UJI MWD TERHADAP DATA SEBELUM DILOGKAN**

MODEL :  $Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + u$

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 08/23/05 Time: 07:33				
Sample: 1983 2003				
Included observations: 21				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-15391634	24728858	-0.622416	0.5419
X2	-12053523	9621749.	-1.252737	0.2273
X3	4309.098	286.7851	15.02553	0.0000
C	-7.10E+09	6.89E+08	-10.29473	0.0000
R-squared	0.942800	Mean dependent var		1.07E+09
Adjusted R-squared	0.932706	S.D. dependent var		1.23E+09
S.E. of regression	3.18E+08	Akaike info criterion		42.16229
Sum squared resid	1.72E+18	Schwarz criterion		42.36125
Log likelihood	-438.7041	F-statistic		93.40138
Durbin-Watson stat	1.553146	Prob(F-statistic)		0.000000

**DATA SETELAH DILOGKAN**

UNTUK UJI MWD

MODEL  $\text{Ln}Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3\text{Ln}X_3 + b_4DM$ 

obs	LN Y	X1	X2	LN X3	DM
1983	18.68170	11.04000	4.230000	14.26610	0.000000
1984	18.63866	10.26000	6.190000	14.33452	0.000000
1985	18.64305	5.010000	3.220000	14.35623	0.000000
1986	18.68937	5.150000	5.460000	14.37521	0.000000
1987	18.92720	5.850000	9.370000	14.38027	0.000000
1988	19.11445	6.610000	7.380000	14.38222	0.000000
1989	19.16288	7.800000	10.20000	14.39949	0.000000
1990	19.61935	8.570000	9.150000	14.41297	0.000000
1991	19.96968	8.740000	10.22000	14.42913	0.000000
1992	20.07093	8.830000	8.490000	14.44176	0.000000
1993	20.15036	8.930000	10.28000	14.44302	0.000000
1994	20.45990	8.970000	10.56000	14.46749	0.000000
1995	20.77141	9.270000	9.540000	14.46836	0.000000
1996	20.77968	9.400000	7.750000	14.50148	0.000000
1997	20.98243	6.110000	11.70000	14.49577	0.000000
1998	20.78909	-17.49000	74.42000	14.52598	0.000000
1999	21.11625	-0.290000	1.770000	14.50570	0.000000
2000	21.26459	4.330000	10.79000	14.60991	0.000000
2001	21.84062	3.640000	11.52000	14.62607	1.000000
2002	22.03256	3.990000	9.080000	14.70917	1.000000
2003	22.20526	4.390000	5.780000	14.82372	1.000000

**UJI MWD TERHADAP DATA SETELAH DILOGKAN**MODEL  $\text{Ln}Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3\text{Ln}X_3 + v$ 

Dependent Variable: LNY					
Method: Least Squares					
Date: 08/23/05 Time: 07:58					
Sample: 1983 2003					
Included observations: 21					
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	
X1	0.024433	0.036960	0.661072	0.5174	
X2	0.012414	0.014316	0.867109	0.3980	
LN X3	8.471237	0.898525	9.427934	0.0000	
C	-102.7055	13.14218	-7.814948	0.0000	
R-squared	0.860310	Mean dependent var	20.18616		
Adjusted R-squared	0.835659	S.D. dependent var	1.171785		
S.E. of regression	0.475030	Akaike info criterion	1.518767		
Sum squared resid	3.836116	Schwarz criterion	1.717724		
Log likelihood	-11.94706	F-statistic	34.89932		
Durbin-Watson stat	1.101718	Prob(F-statistic)	0.000000		

**DATA PERHITUNGAN Z1 DAN Z2 UJI MWD**

obs	F1	F2	LF1	ANTILF2	Z1	Z2
1983	-556338290.4	18.47	NA	104877841.6	NA	661216132.
1984	-89160908.35	19.05	NA	188219245.1	NA	277380154.
1985	186432616.1	19.07	19.04	191800638.9	-0.028387	5368022.75
1986	299017057.8	19.26	19.52	232388816.1	0.252089	-66628241.7
1987	279378428.7	19.37	19.45	259025584.3	0.075640	-20352844.4
1988	306469050.2	19.38	19.54	261731385.9	0.157798	-44737664.3
1989	386438453.3	19.59	19.77	323007715.2	0.179296	-63430738.1
1990	492143778.0	19.71	20.01	364194324.8	0.301083	127949453.
1991	604192160.3	19.87	20.22	424957857.1	0.351902	179234303.
1992	724798349.3	19.96	20.40	463904264.2	0.446215	-260894085.
1993	711900250.7	19.99	20.38	480618168.8	0.392865	-231282082.
1994	907834512.6	20.20	20.63	593962540.3	0.424246	-313871972.
1995	922677646.3	20.20	20.64	595154299.4	0.438459	-327523347.
1996	1220995167.	20.47	20.92	773043381.2	0.457086	447951786.
1997	1175290636.	20.39	20.88	713798856.5	0.698670	-461491779.
1998	1043499501.	20.84	20.77	1128353946.	-0.078180	-84854445.8
1999	1478433829.	20.19	21.11	587055425.7	0.923619	891378404.
2000	2242337268.	21.30	21.53	1777085498.	0.232544	-465251769.
2001	2399527263.	21.43	21.60	2021984687.	0.571192	-377542576.
2002	3263372455.	22.11	21.91	4000085194.	0.203555	736712738.
2003	4575174333.	23.05	22.24	10231581402	-0.804834	565640769.



### ESTIMASI TERHADAP MODEL PERSAMAAN SEBELUM DILOGKAN

$$Y = a_0 + a_1X_1 + a_2X_2 + a_3X_3 + a_4Z_1 + u$$

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Date: 08/23/05 Time: 08:54				
Sample: 1985 2003				
Included observations: 19				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.03E+09	6.14E+08	-13.08900	0.0000
X1	-22986290	19446358	-1.182036	0.2569
X2	-11894915	7566889.	-1.571969	0.1383
X3	4730.095	254.4510	18.58941	0.0000
Z1	3.30E+08	1.83E+08	1.807256	0.0923
R-squared	0.969950	Mean dependent var		1.17E+09
Adjusted R-squared	0.961364	S.D. dependent var		1.25E+09
S.E. of regression	2.45E+08	Akaike info criterion		41.69566
Sum squared resid	8.43E+17	Schwarz criterion		41.94420
Log likelihood	-391.1088	F-statistic		112.9721
Durbin-Watson stat	2.076586	Prob(F-statistic)		0.000000

### ESTIMASI TERHADAP MODEL PERSAMAAN SEBELUM DILOGKAN

$$\text{MODEL } \ln Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3\ln X_3 + b_4Z_2 + v$$

Dependent Variable: LNY				
Method: Least Squares				
Date: 08/23/05 Time: 08:43				
Sample: 1985 2003				
Included observations: 19				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-103.0478	15.39194	-6.694922	0.0000
X1	0.021982	0.044993	0.488571	0.6327
X2	0.010983	0.017641	0.622585	0.5436
LN <sub>X3</sub>	8.497719	1.057677	8.034326	0.0000
Z2	-9.64E-11	3.68E-10	-0.261601	0.7974
R-squared	0.838816	Mean dependent var		20.34679
Adjusted R-squared	0.792764	S.D. dependent var		1.113384
S.E. of regression	0.506848	Akaike info criterion		1.699723
Sum squared resid	3.596530	Schwarz criterion		1.948260
Log likelihood	-11.14737	F-statistic		18.21434
Durbin-Watson stat	1.092779	Prob(F-statistic)		0.000019

Dari kedua hasil estimasi di atas tampak koefisien Z1 maupun Z2 tidak signifikan pada taraf 5% yaitu t hitung Z1 = 1,80 dengan prob 0,0923 dan t hitung Z2 = -0,26 dengan prob 0,7974 sehingga kedua model tersebut sama-sama bisa dipakai. Tetapi karena nilai t hitung Z2 lebih kecil dari Z1 maka persamaan kedua (yaitu setelah dilogkan) dianggap lebih baik.

**DESKRIPSI VARIABEL PENELITIAN**

Date: 08/23/05 Time: 09:28 Sample: 1983 2003				
	Y	X1	X2	X3
Mean	1074972074.10	5.671905	11.29048	1948390.
Median	563886637.00	6.610000	9.150000	1872944.
Maximum	4401724704.00	11.04000	74.42000	2740679.
Minimum	124356422.00	-17.49000	1.770000	1569241.
Std. Dev.	1225640392.	5.978097	14.72682	272871.3
Skewness	1.58	-2.911438	3.997323	1.388434
Kurtosis	4.46	11.97194	17.74808	4.747147
Jarque-Bera Probability	10.56 0.01	100.1014 0.000000	246.2428 0.000000	9.418075 0.009013
Observations	21	21	21	21



## HASIL REGRESI AWAL

Dependent Variable: LNY  
 Method: Least Squares  
 Date: 01/23/06 Time: 22:04  
 Sample: 1983 2003  
 Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-120.6548	20.48748	-5.889198	0.0000
X1	0.023763	0.036654	0.648312	0.5260
X2	0.009755	0.014388	0.678012	0.5075
LN3	9.719246	1.414918	6.869125	0.0000
DM	-0.563935	0.496674	-1.135423	0.2729
R-squared	0.870726	Mean dependent var	20.18616	
Adjusted R-squared	0.838408	S.D. dependent var	1.171785	
S.E. of regression	0.471041	Akaike info criterion	1.536513	
Sum squared resid	3.550072	Schwarz criterion	1.785209	
Log likelihood	-11.13339	F-statistic	26.94204	
Durbin-Watson stat	1.494297	Prob(F-statistic)	0.000001	





## UJI HETEROSKEDASTISITAS TERHADAP REGRESI AWAL

### White Heteroskedasticity Test:

F-statistic	3.107722	Probability	0.037694
Obs*R-squared	11.99439	Probability	0.062094

### Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 01/25/06 Time: 21:59

Sample: 1983 2003

Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-1.591865	7.579089	-0.210034	0.8367
X1	-0.075026	0.062860	-1.193535	0.2525
X1^2	0.003716	0.004727	0.786063	0.4449
X2	-0.008617	0.027884	-0.309040	0.7618
X2^2	-0.000430	0.000788	-0.545907	0.5937
LN3	0.149384	0.524389	0.284872	0.7799
DM	0.134761	0.165745	0.813065	0.4298
R-squared	0.571162	Mean dependent var	0.169051	
Adjusted R-squared	0.387374	S.D. dependent var	0.197465	
S.E. of regression	0.154557	Akaike info criterion	-0.635306	
Sum squared resid	0.334430	Schwarz criterion	-0.287131	
Log likelihood	13.67071	F-statistic	3.107722	
Durbin-Watson stat	3.021632	Prob(F-statistic)	0.037694	

## HASIL REGRESI PERBAIKAN DENGAN WEIGHTED LEAST SQUARE

Dependent Variable: LNY  
 Method: Least Squares  
 Date: 01/23/06 Time: 22:57  
 Sample: 1983 2003  
 Included observations: 21  
 Weighting series: X1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-126.2123	13.89502	-9.083274	0.0000
X1	0.135410	0.044688	3.030134	0.0080
X2	0.052194	0.017846	2.924719	0.0099
LN3	10.01559	0.963750	10.39230	0.0000
DM	-0.277769	0.499527	-0.556065	0.5859

Weighted Statistics			
R-squared	0.999713	Mean dependent var	19.81667
Adjusted R-squared	0.999641	S.D. dependent var	21.39432
S.E. of regression	0.405244	Akaike info criterion	1.235603
Sum squared resid	2.627566	Schwarz criterion	1.484299
Log likelihood	-7.973832	F-statistic	13931.84
Durbin-Watson stat	1.998587	Prob(F-statistic)	0.000000

Unweighted Statistics			
R-squared	0.780822	Mean dependent var	20.18616
Adjusted R-squared	0.726028	S.D. dependent var	1.171785
S.E. of regression	0.613340	Sum squared resid	6.018977
Durbin-Watson stat	1.933102		

stimation Command:

=====  
 LS(W=X1) LNY C X1 X2 LN3 DM

Estimation Equation:

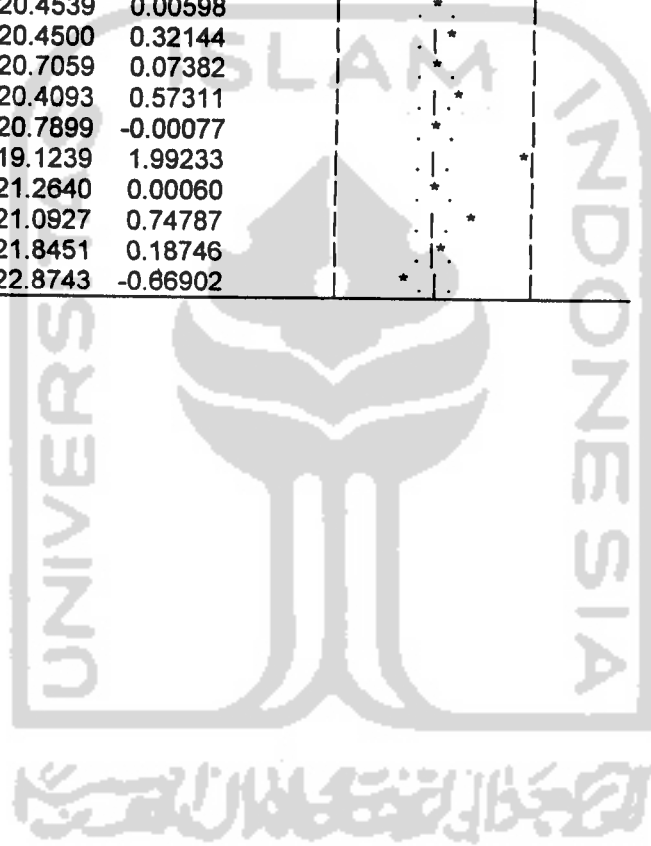
=====  
 LNY = C(1) + C(2)\*X1 + C(3)\*X2 + C(4)\*LN3 + C(5)\*DM

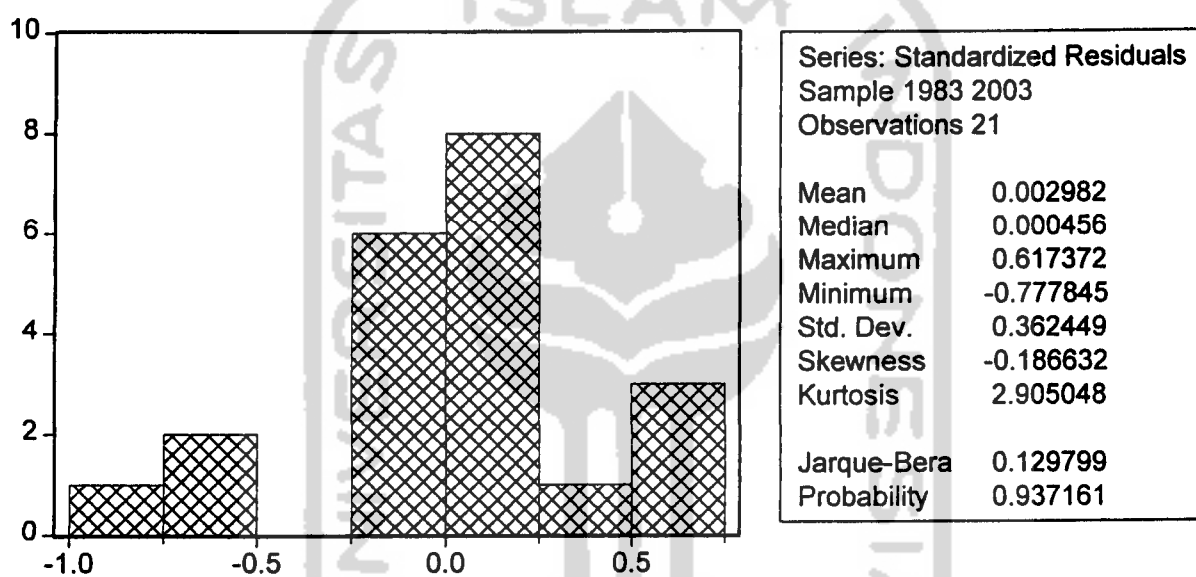
Substituted Coefficients:

=====  
 LNY = -126.2122882 + 0.1354096971\*X1 + 0.05219389189\*X2 + 10.01558633\*LN3 -  
 0.2777693878\*DM

## RESIDUAL PLOT

obs	Actual	Fitted	Residual	Residual Plot
1983	18.6817	18.3868	0.29491	*
1984	18.6387	19.0687	-0.43001	*
1985	18.6430	18.4203	0.22276	*
1986	18.6894	18.7462	-0.05682	*
1987	18.9272	19.0957	-0.16854	*
1988	19.1145	19.1143	0.00012	*
1989	19.1629	19.5956	-0.43271	*
1990	19.6193	19.7801	-0.16076	*
1991	19.9697	20.0208	-0.05112	*
1992	20.0709	20.0692	0.00178	*
1993	20.1504	20.1888	-0.03844	*
1994	20.4599	20.4539	0.00598	*
1995	20.7714	20.4500	0.32144	*
1996	20.7797	20.7059	0.07382	*
1997	20.9824	20.4093	0.57311	*
1998	20.7891	20.7899	-0.00077	*
1999	21.1162	19.1239	1.99233	*
2000	21.2646	21.2640	0.00060	*
2001	21.8406	21.0927	0.74787	*
2002	22.0326	21.8451	0.18746	*
2003	22.2053	22.8743	-0.66902	*



**UJI NORMALITAS RESIDUAL**

## UJI LINIERITAS

### Ramsey RESET Test:

F-statistic	0.048978	Probability	0.827836
Log likelihood ratio	0.068457	Probability	0.793597

### Test Equation:

Dependent Variable: LNY

Method: Least Squares

Date: 01/25/06 Time: 22:15

Sample: 1983 2003

Included observations: 21

Weighting series: X1

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-219.3992	421.3150	-0.520749	0.6101
X1	0.225884	0.411402	0.549059	0.5910
X2	0.087164	0.159084	0.547914	0.5918
LNX3	16.87739	31.02145	0.544056	0.5944
DM	-0.385873	0.709860	-0.543590	0.5947
FITTED^2	-0.017372	0.078498	-0.221309	0.8278

### Weighted Statistics

R-squared	0.999714	Mean dependent var	19.81667
Adjusted R-squared	0.999619	S.D. dependent var	21.39432
S.E. of regression	0.417853	Akaike info criterion	1.327581
Sum squared resid	2.619015	Schwarz criterion	1.626016
Log likelihood	-7.939604	F-statistic	10483.01
Durbin-Watson stat	1.992281	Prob(F-statistic)	0.000000

### Unweighted Statistics

R-squared	0.791127	Mean dependent var	20.18616
Adjusted R-squared	0.721503	S.D. dependent var	1.171785
S.E. of regression	0.618384	Sum squared resid	5.735982
Durbin-Watson stat	1.918548		

**UJI MULTIKOLINERITAS VAR X1**

Dependent Variable: X1  
 Method: Least Squares  
 Date: 01/25/06 Time: 22:17  
 Sample: 1983 2003  
 Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X2	-0.334541	0.049802	-6.717379	0.0000
LN3	-9.419719	9.079252	-1.037499	0.3140
DM	-0.218069	3.285985	-0.066363	0.9479
C	145.8214	130.8676	1.114267	0.2807
R-squared	0.768947	Mean dependent var		5.671905
Adjusted R-squared	0.728173	S.D. dependent var		5.978097
S.E. of regression	3.116801	Akaike info criterion		5.281135
Sum squared resid	165.1456	Schwarz criterion		5.480091
Log likelihood	-51.45191	F-statistic		18.85876
Durbin-Watson stat	1.127758	Prob(F-statistic)		0.000012

**UJI MULTIKOLINERITAS VAR X2**

Dependent Variable: X2  
 Method: Least Squares  
 Date: 01/25/06 Time: 22:18  
 Sample: 1983 2003  
 Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X1	-2.171184	0.323219	-6.717379	0.0000
LN3	-5.281763	23.81651	-0.221769	0.8271
DM	-5.617907	8.260697	-0.680077	0.5056
C	100.8562	344.4852	0.292774	0.7732
R-squared	0.752903	Mean dependent var		11.29048
Adjusted R-squared	0.709298	S.D. dependent var		14.72682
S.E. of regression	7.940225	Akaike info criterion		7.151404
Sum squared resid	1071.802	Schwarz criterion		7.350360
Log likelihood	-71.08974	F-statistic		17.26634
Durbin-Watson stat	1.954823	Prob(F-statistic)		0.000021

### UJI MULTIKOLINIERITAS VARIABEL LNX3

Dependent Variable: LNX3  
 Method: Least Squares  
 Date: 01/25/06 Time: 22:19  
 Sample: 1983 2003  
 Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
X2	-0.000546	0.002463	-0.221769	0.8271
X1	-0.006322	0.006093	-1.037499	0.3140
DM	0.272690	0.053611	5.086476	0.0001
C	14.47709	0.065718	220.2922	0.0000
R-squared	0.675001	Mean dependent var	14.47403	
Adjusted R-squared	0.617649	S.D. dependent var	0.130578	
S.E. of regression	0.080743	Akaike info criterion	-2.025456	
Sum squared resid	0.110829	Schwarz criterion	-1.826500	
Log likelihood	25.26729	F-statistic	11.76930	
Durbin-Watson stat	1.133542	Prob(F-statistic)	0.000205	

### UJI MULTIKOLINIERITAS VARIABEL DUMMY

Dependent Variable: DM  
 Method: Least Squares  
 Date: 01/25/06 Time: 22:20  
 Sample: 1983 2003  
 Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LNX3	2.213038	0.435083	5.086476	0.0001
X2	-0.004714	0.006932	-0.680077	0.5056
X1	-0.001188	0.017897	-0.066363	0.9479
C	-31.82874	6.363690	-5.001617	0.0001
R-squared	0.650216	Mean dependent var	0.142857	
Adjusted R-squared	0.588489	S.D. dependent var	0.358569	
S.E. of regression	0.230019	Akaike info criterion	0.068330	
Sum squared resid	0.899445	Schwarz criterion	0.267286	
Log likelihood	3.282539	F-statistic	10.53380	
Durbin-Watson stat	1.374196	Prob(F-statistic)	0.000377	